

Bab II

INFILTRASI IDEOLOGI WAHABI-IKHWANUL MUSLIMIN DI INDONESIA

Wahabi

KANJENG NABI MUHAMMAD SAW. PERNAH MENYATAKAN BAHWA umatnya akan terpecah menjadi 73 kelompok, semua masuk neraka kecuali satu.¹ Mereka —yang akan selamat— adalah “yang berpegang kepada Sunnahku dan jamâ‘ah sahabatku” (*mâ ana ‘alaih wa ash-hâbi*). Kelompok ini kemudian masyhur disebut *Ahlussunnah wal-jamâ‘ah (aswaja)*, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan jamâ‘ah sahabat. Para ulama kemudian berusaha keras mengidentifikasi karakter *aswaja* ini, yang kemudian —di dalam konteks interaksi sosial— tersimpul dalam sikap *al-tawassuth wali‘tdâl*, sikap moderat dan konsisten.

Hadits prediktif ini sangat masyhur karena terkait dengan ke-

1. Versi lain menyatakan, “Semua akan selamat, kecuali satu.” Namun riwayat ini dinilai lemah (*dla‘if*). Baca dalam: *Nazhm al-Mutanâtsir*, jilid I, h. 47; bandingkan juga dalam: Abû Nu‘ain Ahmad ibn ‘Abdillah al-Isbahânî, *Hilyat al-Auliya’* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabî, 1405 H.), jilid IX, h. 242.

selamatan di akhirat kelak. Itu pula sebabnya muncul dua versi hadits yang sangat berbeda, apakah dari 73 kelompok tersebut 1 yang selamat atau 1 yang celaka. Terkait dengan keselamatan ini pula, ada kelompok yang mengklaim bahwa hanya kelompoknya yang paling benar dan kelak akan selamat di akhirat. Demi klaim kebenaran dan keselamatan ini, mereka mudah mengkafirkan pihak lain semata untuk menegaskan bahwa diri dan kelompoknya saja yang paling benar, paling mukmin, paling muslim, dan paling selamat. Mereka lupa bahwa keselamatan tidak ditentukan dengan klaim-klaim semacam itu, tetapi dengan ketulusan dan keikhlasan dalam beragama, dengan berserah diri, tunduk, dan patuh hanya kepada Allah swt., dan –dalam term negatif– tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Padahal, dalam kesempatan lain, Nabi saw. memperingatkan bahwa, “Siapa pun yang mengkafirkan saudaranya tanpa penjelasan yang nyata, adalah dia sendiri yang kafir” (*man kaffara akhâhu bi-ghairi ta’wîl-fa-huwa kamâ qâla*).² Atau dalam riwayat lain, “Siapa pun yang mekafirkan saudaranya, maka salah seorang darinya benar-benar kafir” (*man kaffara akhâhu-fa-qad bâ’a bihâ ahaduhâ*).³ Maka, yang manapun dan dari sisi manapun kedua riwayat tersebut direnungkan, seorang muslim *kâffah* lahir-batin tidak akan pernah mengkafirkan muslim yang mana pun.

Dalam sejarah Islam, pengkafiran paling awal gemar dilakukan oleh kelompok *Khawârij*, sekelompok orang yang keluar (desersi) dari barisan Khalifah ‘Ali ibn Abi Thalib terkait *Tahkîm* dalam perang Shiffin melawan Mu‘awiyah. Sebagai kelompok yang tidak setuju dengan *tahkîm*, mereka mengkafirkan siapa pun yang berbeda sikap dan pandangan, baik dari pihak ‘Ali maupun Mu‘awiyah. Bahkan, mereka membunuh siapa pun yang telah dikafirkan. Jargon mereka bahwa “Hukum hanya milik Allah,” telah mengesam-

2. Hadits riwayat Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid xx, Bab 73 (Mesir: Mauqif Wizârat al-Auqâf, t.t.), h. 259.

3. Hadits riwayat Ahmad ibn Hanbal, *Masnad Ahmad*, Bab Masnad ‘Abdullah ibn ‘Umar, jilid XIII (Mesir: Mauqif Wizârat al-Auqâf, t.t.), h. 455.

pingkan peran akal manusia dalam memahami pesan-pesan wahyu.⁴

Aksi-aksi Khawârij ini telah menjadi preseden buruk bagi generasi Muslim berikutnya. Dengan aksi-aksi kejam dan destruktifnya mereka tidak hanya mengacaukan stabilitas politik, tetapi juga mendistorsi logika berfikir umat Islam dan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dewasa ini, para ulama lazim menyebut siapa pun yang mewarisi kebiasaan buruk Khawârij ini sebagai neo-Khawârij.

Beberapa tabi'at buruk Khawârij, antara lain: memahami al-Qur'an dan hadits hanya secara harfiah dan tertutup; gemar mengkafirkan siapa pun yang mempunyai sikap dan/atau pemahaman yang berbeda dari mereka; dan tidak segan-segan membunuh siapa pun yang dikafirkan. Beberapa tabi'at buruk ini juga menjadi bagian dari tabi'at Wahabi yang muncul di jazirah Arab pada abad ke-18. Memang, Wahabi tidak bisa dikatakan sebagai penerus Khawârij. Bahkan, ia dianggap sebagai fenomena yang sama sekali baru dan tidak mempunyai pendahulu sebelumnya dalam sejarah Islam.⁵ Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam sejarah pemikiran Islam, Wahabi tidak menempati posisi penting apa pun, bahkan secara intelektual marjinal (Wahabi menjadi signifikan bukan karena pemikirannya, tapi karena kekuasaan politik Ibn Saud dan penerusnya). Di samping itu, para peneliti dan sejarawan Islam memandang Wahabi sebagai fenomena khas yang terpisah dari aliran-aliran pemikiran maupun gerakan Islam lainnya. Bahkan, para

4. Kelompok *Khawârij* dan para pengikutnya sepanjang sejarah telah —secara keliru— meyakini bahwa pemahaman mereka atas ajaran agama, interpretasi mereka atas teks-teks suci, juga mempunyai kebenaran mutlak sebagaimana ajaran agama dan teks-teks suci adanya. Ini adalah penyakit epistemologis yang telah membuat perbedaan pendapat tidak produktif. Padahal, dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur Nabi saw. menuturkan, “Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat” (*ikhtilâfu ummati rahmah*).

5. Hamid Algar, *Wahhabism: A Critical Essay* (New York: Islamic Publication International, 2002), h. 10.

tokoh Sunni paling awal menilai Wahabi tidak termasuk golongan *Ahlussunnah wal-jamâ'ah*.⁶

Wahabi adalah sebuah sekte keras dan kaku pengikut Muhammad ibn 'Abdul Wahab. Ayahnya, 'Abdul Wahab adalah hakim (*qâdli*) 'Uyaynah pengikut madzhab Ahmad ibn Hanbal. Ibn 'Abdul Wahab lahir pada tahun 1703/1115 di 'Uyaynah, termasuk daerah Najd, belahan timur Kerajaan Saudi Arabia sekarang. Dibandingkan dengan Yaman dan Syria, Nabi pernah mengungkapkan bahwa tidak akan muncul apa pun dari Najd selain goncangan fitnah dan setan (*al-zalâzil wal-fitân wa qarn al-syaitân*). Mungkin saja pernyataan Nabi ini tidak terkait dengan Wahabi, tapi jelas bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah yang paling akhir menerima Islam dan kampung Musailamah al-Kadzdzab.

'Utsman ibn 'Abdullah ibn Bisyr, sejarawan standar Saudi, memuji Ibn 'Abdul Wahab sebagai orang yang mendapat berkah Tuhan sehingga mampu memahami masalah-masalah yang bertentangan dan menunjukkan jalan lurus kepada siapa pun. Namun ayah dan kakak kandung Ibn 'Abdul Wahab sendiri telah sejak awal mencium gelagat tak beres dalam pemikiran pendiri Wahabi ini. Konon, 'Abdul Wahab diberhentikan dari posisi sebagai hakim dan diperintahkan meninggalkan 'Uyaynah pada tahun 1726/1139 karena ulah anaknya yang ganjil dan berbahaya ini. 'Utsman menghindari menceritakan detail perselisihan anak dengan ayah dan kakak kandungnya secara diplomatis dengan mengungkapkan sebagai "percakapan di antara keduanya" (*waqa'a bainahu wa baina abihi kalâm*),⁷ belakangan Sulaiman ibn 'Abdul Wahab, kakak kandung pendiri Wahabi ini, mengkritik dan menulis penolakan panjang lebar tentang pemikiran adik kandungnya ini (*al-Shawâ'iq al-Ilâhiyyah fi al-radd 'alâ al-Wahhâbiyyah*).⁸

6. Hamid Algar, *ibid.*, h. 2-3.

7. 'Utsman ibn 'Abdullah ibn Bisyr, *Unwân al-Majd fi Târikh al-Najd* (t.t., t.t.), h. 8.

8. Edisi terbaru buku *al-Shawâ'iq al-Ilâhiyyah fi al-radd 'alâ al-Wahhâbiyyah* (Per-

Pemahaman ekstrem, kaku, dan keras Ibn ‘Abdul Wahab, yang terus dipelihara dan diperjuangkan para pengikutnya (*Wahabi*) hingga saat ini, adalah hasil dari pembacaan harfiah atas sumber-sumber ajaran Islam. Ini pula yang telah menyebabkan dia menolak rasionalisme, tradisi, dan beragam khazanah intelektual Islam yang sangat kaya. Dalam hal polemik, Kristen, Syi‘ah, tasawuf, dan Mu‘tazilah merupakan target utamanya. Namun bukan berarti bahwa selain kelompok tersebut aman dari kecaman yang didasarkan pada pembacaan harfiah atas teks-teks suci (baca: al-Qur‘an dan Sunnah).

Literalisme Wahabi telah membuat teks-teks suci menjadi *corpus* tertutup terhadap cara pembacaan selain pembacaan secara harfiah *à la* Ibn ‘Abdul Wahab. Pemahaman ini telah memutus teks-teks suci dari konteks masa risalah maupun konteks masa pembacaan. Teks-teks suci, dan akhirnya Islam sendiri, tidak lagi komunikatif dengan konteks para penganutnya. Islam yang semula sangat apresiatif dan penuh perasaan dalam merespon permasalahan umat, di tangan Ibn ‘Abdul Wahab berubah menjadi tidak peduli, keras dan tak berperasaan.

Dari perspektif Ibn ‘Abdul Wahab, tujuan utama literalisme ini mungkin untuk menghindari kompleksitas pemahaman dan praktik hukum, telogi dan tasawuf umat Islam yang telah tumbuh sejak berakhirnya masa risalah. Namun membayangkan bahwa setiap individu atau masyarakat akan mengamalkan Islam sebagaimana makna harfiah kitab suci dan hadits, tanpa pengaruh tradisi maupun budaya setempat, tentu sangat tidak realistis dan merupakan mimpi belaka. Literalisme tertutup, dalam kebanyakan ka-

ingatan Keras Ilahi dalam Menolak Paham Wahabi) ini dicetak menjadi satu buku dengan karya Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan, Mufti Makkah ketika itu, yang berjudul *Al-Durar al-Sunniyyah fi al-Radd ‘alâ al-Wahhâbiyyah* (Permata Sunni dalam Menolak Paham Wahhabi), baca dalam: ‘Abdullah al-Qashîmî, *Al-Tsaurah al-Wahhâbiyyah* (Pemberontakan Wahabi), Köln, Germany: Al-Makel Verlag, 2006.

susnya, lebih disebabkan ketidakmampuan memahami kompleksitas realitas sosial dalam kaitannya dengan kompleksitas pesan-pesan luhur ajaran agama. Akibatnya, semua direduksi sesuai dengan daya tampung atau daya paham si pembaca. Dengan kata lain, ke-luhuran dan keluasan pesan agama kandas di keterbatasan daya pikir pembaca yang kaku.

Literalisme Ibn ‘Abdul Wahab yang tertutup tidak bisa dibandingkan dengan literalisme Ibn ‘Arabi —misalnya— yang terbuka. Literalisme tertutup membatasi makna sebuah teks atau teks-teks dari makna-makna lain yang sama-sama berkemungkinan benar, dan ini merupakan reduksi dan distorsi terhadap pesan teks itu sendiri. Sedangkan literalisme terbuka merupakan pencarian makna teks atau teks-teks secara luas dan terbuka dengan tetap berusaha berpegang kuat pada makna harfiah teks yang bersangkutan namun tanpa terikat secara kaku.⁹

Literalisme tertutup *à la* Wahabi sebenarnya mengidap penyimpangan epistemologis yang akut. Ia tidak akan pernah mampu melihat, apalagi memahami, kebenaran lain yang berbeda dari kebenaran harfiah yang dicapainya. Bahkan tidak akan pernah mampu memahami kompleksitas teks-teks suci, apalagi dalam kaitannya dengan kompleksitas realitas sosial. Sebagai penyakit epistemologis, ketertutupan semacam ini lazim melahirkan klaim-klaim kebenar-

9. Sebagai ilustrasi, *kâfir* menurut Ibn ‘Abdul Wahab sangat jauh berbeda dari *kâfir* menurut Ibn ‘Arabi. Bagi yang pertama, *kâfir* adalah lawan dari muknim, dan kemudian halal darahnya untuk ditumpahkan. Sedangkan bagi yang kedua, *kâfir* adalah suatu kondisi tertutup atau menolak kebenaran sejati, atau bahkan sumber kebenaran sejati. Bisa jadi, penolakan ini disebabkan sifat *takabbur* atau terbatasnya pengetahuan. Karena itu, mereka tidak boleh dimusuhi, apalagi diputuskan halal darahnya. Masih menurut yang kedua, *kâfir* juga bermakna tertutup dari apa pun selain Allah swt., maka *kâfir* dalam makna ini merupakan salah satu tingkat tertinggi wali Allah swt. Konon, dalam tradisi tasawuf dikenal *joke* bahwa siapa pun yang sudah dikafirkan oleh 41 orang, dan dia tetap bersabar, tidak melakukan perlawanan, apalagi mengkafirkan, maka dia sebenarnya adalah wali Allah swt.

an sepihak (*one-sided truth claims*), serta menolak dan menyalahkan apa pun/siapa pun yang berbeda.

Sebenarnya, klaim kebenaran sepihak yang kemudian mengandalkan klaim-klaim teologis dengan mengkafirkan pihak lain, merupakan sikap beragama yang tidak dewasa dan menunjukkan tidak adanya sifat rendah hati (*islâm*). Keyakinan yang dewasa dan rendah hati tidak akan pernah terganggu oleh keyakinan lain yang berbeda, bahkan akan berbagi secara terbuka untuk mencapai kebenaran hakiki. Dan al-Qur'ân sendiri menegaskan bahwa perbedaan adalah cobaan, dan tidak perlu diseragamkan. Penolakan terhadap perbedaan ini merupakan dampak langsung dari penyakit penyimpangan epistemologis literalisme tertutup manapun.

Setiap konklusi yang dihasilkan dari metode yang tidak sehat, pasti akan menyebabkan aksi-aksi yang tidak sehat pula. Distorsi dan reduksi terhadap pesan-pesan luhur Islam, dalam kasus Wahabi, kemudian menyebabkan aksi-aksi destruktif terhadap tradisi spiritual dan intelektual Islam sendiri, dan kemudian menyebabkan distorsi dan kekejaman sosial dan budaya terhadap masyarakat Islam dan masyarakat global secara keseluruhan, bahkan kekerasan terhadap ajaran Islam sendiri.

Dalam perkembangannya, setelah tak sabar dengan proses dialog dalam melakukan perubahan, Ibn 'Abdul Wahab akhirnya menyimpulkan bahwa kata-kata saja tidak cukup (*lâ yughnî al-qaul*).¹⁰ Dia berusaha melakukan perubahan melalui perbuatan.¹¹

10. 'Utsman ibn 'Abdullah ibn Bisyr, *Unwân alMajd fi Târikh al-Najd* (t.t., t.t.), h. 7.

11. Dalam hal ini Wahabi mendasarkan aksi-aksinya pada hadits tentang *amr ma'rûf*, yakni: *Man ra'â minkum munkaran, fa'yughayyir biyadih, fa-inlam yasthathi' fa-bilisânih, fa-inlam yasthathi' fa-biqalbih, wa dzâlik min adl'âf al'imân* (Siapa pun di antara kalian yang melihat *kemungkaran*, hendaknya dia mengatasinya dengan 'tangannya,' jika tidak mampu maka dengan 'lisannya,' jika tidak mampu maka [menyesali saja dalam] 'hatinya.' Itu termasuk paling lemahnya iman). Wahabi memahami bahwa siapa pun yang melihat *kemungkaran* harus bertindak secara fisik, jika tidak mampu cukup dengan ucapan, dan jika tidak mampu cukup

Ketika ayahnya wafat pada tahun 1740/1153, Ibn ‘Abdul Wahab kembali ke ‘Uyaynah dan mendapat dukungan dari ‘Utsman ibn Mu‘ammar, penguasa setempat. Hal ini telah memberinya keleluasaan dan kekuatan untuk tidak hanya menggunakan kata-kata terhadap siapa pun yang dipandangnya menyimpang dari ajaran Islam (harus ditekankan bahwa, sebenarnya menyimpang dari pemahaman Ibn ‘Abdul Wahab atas ajaran Islam). Ibn Mu‘ammar menyediakan sekitar 600 orang pasukan untuk mengawal Ibn ‘Abdul Wahab dan para pengikutnya dalam melakukan aksi-aksinya. Ibn ‘Abdul Wahab memperkuat dukungan ini dengan menikahi al-Jauhara, bibi penguasa ‘Uyaynah tersebut.

Aksi kekerasan pertama Wahabi ketika itu adalah menghancurkan makam Zaid ibn al-Khaththab, sahabat Nabi dan saudara kandung ‘Umar ibn al-Khaththab. Sebelum itu, aksi-aksi pemurtadan dan pengkafiran pun dilancarkan, sebagai pembuka aksi-aksi kekerasan yang akan dilakukan. Namun patronase ini tidak berlangsung lama karena kepala suku daerah tersebut mencium bahaya laten dalam gerakan Wahabi. Atas desakan inilah, Ibn ‘Abdul Wahab meninggalkan ‘Uyaynah, pindah ke Dir‘iyah dan menemukan sekutu baru, Muhammad ibn Sa‘ud, yang terbukti menjadi sekutu permanen. Aliansi baru ini kelak melahirkan Kerajaan Saudi-Wahabi modern.

Muhammad ibn Sa‘ud adalah politikus cerdas. Ia tidak menyalahkan kesempatan sangat berharga untuk memberi dukungan kepada Ibn ‘Abdul Wahab demi meraih kepentingan politiknya.

menyesali dalam hati. Para ulama Aswaja lazim memahami hadits ini bahwa aksi secara fisik adalah otoritas pemerintah/penguasa, bukan otoritas individual. Sedangkan yang kedua, dengan lisan (dan para ulama meyakini juga dengan tulisan), adalah wilayah yang bisa diperankan oleh individu-individu yang alim/berpengetahuan, mengerti masalah agama secara mendalam. Tidak mampu memberi peringatan secara lisan maupun tulisan, hanya menyesali dalam hati, menunjukkan lemahnya iman. Karena orang yang demikian, salah satunya bodoh karena tidak belajar untuk meningkatkan pengetahuannya, atau malas dan tidak mau tahu dengan permasalahan masyarakatnya.

Dia minta jaminan Ibn ‘Abdul Wahab untuk tidak mengganggu kebiasaannya mengumpulkan upeti tahunan dari penduduk Dir‘iyah. Ibn ‘Abdul Wahab meyakinkannya bahwa *jihād* ke depan akan memberinya keuntungan yang lebih besar daripada upeti yang dia impikan. Maka, panggung pemurtadan, pengkafiran, dan aksi-aksi kekerasan yang akan dilakukan ke seluruh jazirah Arab pun dibangun di atas aliansi permanen ini.

Pada tahun 1746/1159, Wahabi-Sa‘ud secara resmi memproklamasikan *jihād* terhadap siapa pun yang mempunyai pemahaman *tauḥīd* berbeda dari mereka. Kampanye ini diawali dengan tuduhan *syirk* (*polytheist*), murtad, dan kafir. Setiap Muslim yang tidak mempunyai pemahaman dan praktik ajaran Islam yang persis seperti Wahabi dianggap murtad, karenanya perang dibolehkan, atau bahkan diwajibkan, terhadap mereka. Razia, penggerebekan dan perampokan terhadap mereka pun dilakukan. Dengan demikian, predikat Muslim –menurut Wahabi– hanya merujuk secara eksklusif kepada para pengikut Wahabi, seperti digunakan dalam buku ‘*Unwān al-Majd fi Tārīkh al-Najd*, salah satu buku sejarah resmi Wahabi.

Sekitar lima belas tahun setelah proklamasi jihad ini, Wahabi sudah menguasai sebagian besar jazirah Arab, termasuk Najd, Arabia tengah, ‘Asir, dan Yaman. Muhammad ibn Sa‘ud yang meninggal pada tahun 1766/1180 digantikan oleh ‘Abdul ‘Aziz, yang pada 1773/1187 merebut Riyadh, dan sekitar tujuh belas tahun kemudian mulai berusaha merebut Hijaz. Muhammad ibn ‘Abdul Wahab wafat tahun 1791/1206, sesaat setelah perang melawan para penguasa Hijaz dimulai. Kurang dari satu dekade, ajaran Wahabi sudah dipaksakan dengan senjata kepada penduduk *Haramain* (Makkah dan Madinah), walaupun hanya sesaat, pemaksaan ini mempunyai pengaruh yang luar biasa tidak hanya di Hijaz, tetapi juga di dunia Islam lainnya, termasuk Nusantara.

Tahun 1802/1217 Wahabi menyerang Karbala, membunuh mayoritas penduduknya yang mereka temui baik di pasar maupun

di rumah, termasuk wanita dan anak-anak. Wahabi juga menghancurkan kubah makam Husein serta menjarah berlian, permata, dan kekayaan apa pun yang mereka temukan di makam tersebut. Pada 1803/1217 Wahabi kembali menyerang Hijaz, dan Ta'if adalah kota pertama yang mereka serbu. Pada 1805/1220 mereka merebut Madinah dan 1806/1220 merebut Makkah untuk kedua kalinya. Seperti biasa, Wahabi memaksa para ulama menyatakan sumpah setia dengan todongan senjata.

Pendudukan Haramain ini berlangsung sekitar enam setengah tahun. Periode kekejaman ini ditandai dengan pembantaian dan pemaksaan ajaran Wahabi kepada penduduk *Haramain*, penghancuran bangunan-bangunan bersejarah dan pekuburan, pembakaran buku-buku selain al-Qur'an dan hadits, larangan merayakan Maulid Nabi, pembacaan puisi *Barzanji*, pembacaan beberapa hadits *mau'izhah hasanah* sebelum khotbah Jum'at, larangan memiliki rokok dan mengisapnya, bahkan sempat mengharamkan kopi.

Semua kekejaman Wahabi ini berakhir ketika Muhammad 'Ali Pasha, Gubernur Mesir, atas perintah Sultan 'Utsmani berhasil membebaskan Haramain. Pada tahun 1811/1226 Muhammad 'Ali Pasha mendarat di pelabuhan Yanbu', pesisir Laut Merah, dan pada akhiri tahun berikutnya dia berhasil membebaskan Madinah dan membebaskan Makkah tiga bulan kemudian. Wahabi mundur ke Najd dan menyatukan semua kekuatannya di sana, namun Muhammad 'Ali Pasha terus mengejar mereka dan berhasil merebut Dir'iyah, ibu kota Wahabi ketika itu, pada tahun 1819/1234. Sayangnya, kemenangan Sultan 'Utsmani ini hanya membuat Wahabi terkubur untuk beberapa tahun. Pada tahun 1832/1248, Wahabi bangkit lagi dari kuburnya dan memulai ekspedisi militer terhadap 'Uman dan memaksa Sultan Muscat membayar upeti kepada Riyadh. Wahabi sadar bahwa Makkah dan Madinah bukan hanya pusat gravitasi religius, tetapi juga sumber keuntungan ekonomi yang tidak akan pernah berakhir. Karena itu, setelah berhasil menguasai daerah sekitarnya, Wahabi terus berusaha merebut ke-

dua kota suci tersebut, dan baru pada tahun 1925 berhasil kembali merebut Makkah dan Madinah, dan kali ini didukung “perjanjian pertemanan dan kerjasama” yang ditandatangani penguasa Wahabi-Saudi ketika itu dengan pihak Inggris.

Sejarah Wahabi tidak pernah lepas dari aksi-aksi kekerasan, baik doktrinal, kultural, maupun sosial. Dalam penaklukan jazirah Arab 1920-an ini, lebih dari 400 ribu umat Islam dibunuh, dieksekusi secara publik atau diamputasi, termasuk wanita dan anak-anak.¹² Selain itu, kekayaan dan para wanita di daerah yang ditaklukan sering dibawa sebagai rampasan perang. Setelah itu, seperti biasa, Wahabi memaksakan ajarannya kepada semua Muslim yang berada di daerah taklukannya. Wahabi kemudian menjadi ‘agama’ baru.

Ringkasnya, sikap dan kesukaan utama Wahabi sejak awal gerakannya, selain membunuh serta merampas kekayaan dan wanita, juga termasuk menghancurkan kuburan dan peninggalan-peninggalan bersejarah; mengharamkan *tawassul*, *isti‘āna* dan *istighātsah*, *syafā‘at*, *tabarruk*, dan ziyarah kubur; membakar buku-buku yang tidak sejalan dengan paham mereka; memvonis musyrik, murtad, dan kafir siapa pun yang melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Wahabi, walaupun sebenarnya tidak haram. Memang, sebelum mempunyai kekuatan fisik atau militer, Wahabi lazim melakukan kekerasan doktrinal, intelektual dan psikologis dengan menyerang siapa pun sebagai musyrik, murtad, dan kafir. Namun, setelah mereka mempunyai kekuatan fisik atau militer, tuduhan tersebut dilanjutkan dengan serangan-serangan fisik seperti pemukulan, amputasi, dan pembunuhan. Wahabi menyebut semua ini sebagai dakwah, *amr ma‘rūf nahy munkar* dan jihad, terminologi yang sebenarnya tidak mempunyai konotasi kekerasan dalam bentuk apa pun.¹³ Fenomena serupa belakangan banyak

12. Hamid Algar, *ibid.*, h. 42.

13. Secara harfiah *jihad* bermakna kesungguhan, keseriusan dalam menunaikan suatu kewajiban atau kegiatan. Secara *generik* kata ini bersifat netral dan baru

bermunculan di Indonesia, dan sulit menolak adanya relasi antara fenomena tersebut dengan paham Wahabi yang kini menjadi ideologi resmi Kerajaan Arab Saudi dan disebarkan ke Nusantara oleh para agen mereka dengan dukungan dana yang luar biasa dan cara yang sistematis.

Penolakan terhadap Wahabi

Sebelum serangan ke World Trade Center (WTC), pemerintah Saudi memang membiayai al-Qaeda, kelompok yang menggunakan kekerasan bersenjata dalam berbagai aksi-aksi agitatif dan destruktifnya. Namun setelah serangan 11 September 2001, terutama setelah al-Qaeda menyerang Kerajaan Arab Saudi, pemerintah Saudi sepertinya berhenti membiayai gerakan teror tersebut.

mempunyai makna konotatif ketika disandingkan dengan aktivitas tertentu. Belajar dengan sungguh-sungguh dipandang sebagai *jihad* karena kesungguhan dan keseriusan di dalamnya, bukan karena belajarnya. Ketika diucapkan dalam konteks ‘perang’ pun, *jihad* sebenarnya merujuk pada kesungguhan dan keseriusan di dalamnya, bukan kepada perangnya. Dalam konteks ini, sabda Nabi Muhammad saw., “*Raja’nâ min jihâd al-ashghar ilâ jihâd al-akbar*” (“Kita baru saja pulang dari kesungguhan (*jihad*) dalam bidang yang kecil menuju kesungguhan (*jihad*) dalam bidang yang besar”) seharusnya tidak dipahami sebagai pulang dari ‘perang kecil’ menuju ‘perang besar,’ melainkan dari ‘perjuangan kecil’ menuju ‘perjuangan besar.’ Perjuangan fisik seperti perang, menuntut kesungguhan dan keseriusan yang tidak seberapa dibandingkan perjuangan non-fisik seperti pengendalian diri. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia, penegakan hukum dan jaminan keadilan, juga merupakan jihad ketika semua itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam Islam, seperti dalam sabda Nabi Muhammad saw., usaha mengendalikan diri dipandang sebagai jihad besar karena ia menuntut keseriusan dan kesungguhan yang luar biasa. Dalam konteks inilah, seharusnya, *amr ma’rûf nahy munkar* dilaksanakan; yakni, hanya mereka yang telah bersungguh-sungguh mengendalikan dirinya, yang perbuatan dan ucapannya telah bisa menjadi teladan bagi orang lain, yang berhak melaksanakan *amr ma’rûf nahy munkar*. *Jihâd* dan *amr ma’rûf nahy munkar* memiliki citra kotor dan buruk karena telah dijadikan jargon yang sarat dengan alasan politik dan dilakukan oleh mereka yang sebenarnya masih harus berjuang mengendalikan dirinya dan belum mampu menjadi teladan bagi yang lain.

Tetapi, pemerintah Saudi terus membiayai penyebaran ideologi Wahabi ke seluruh dunia (wahabisasai global). Kekerasan terorisme dengan peledakan bom dan semacamnya memang sangat berbahaya, namun ideologi dengan kekerasan teologis, psikologis, kultural, dan intelektual —dengan tujuan untuk menghancurkan budaya (*cultural genocide*) dan mengendalikan negara lain— jauh lebih berbahaya dari bom.

Berbagai bentuk aksi kekerasan yang dilakukan Wahabi membuat kebanyakan ulama dan umat Islam sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan bukanlah Islam. Dugaan paling baik, ini pun dari titik pandang Ibn ‘Abdul Wahab, yang diperjuangkan adalah pemahaman tertentu atas Islam yang sangat keras dan ekstrem. Pemahaman harfiah tertutup yang berusaha memahami Kebenaran namun —karena tertutup— kemudian merasa sebagai “Kebenaran” itu sendiri.

Pandangan atas gerakan Wahabi ini akan jauh berbeda jika dilihat dari titik pandang Ibn Sa‘ud. Pandangan keagamaan Ibn ‘Abdul Wahab yang keras dan kejam —bagi Ibn Sa‘ud— jelas merupakan senjata politik potensial yang sangat ampuh dan strategis (baca: mematikan). Bagi siapa pun yang tidak terbiasa memperlakukan teks-teks maupun ajaran agama secara rasional, dewasa, dan penuh perasaan, klaim-klaim dan tuduhan-tuduhan teologis akan sulit ditolak. Ketakberdayaan di hadapan klaim dan tuduhan teologis inilah yang menjanjikan kekuasaan politik dan kekayaan bagi Ibn Sa‘ud. Hal ini terlihat dari kesepakatan antara pendiri Wahabi dan pendiri Kerajaan Saudi ini, bahwa Ibn ‘Abdul Wahab dan keturunan laki-lakinya akan mengendalikan otoritas keagamaan, sedangkan Ibn Sa‘ud dan keturunan laki-lakinya akan memegang kekuasaan politik, dan masing-masing akan menikahi keturunan wanita yang lain agar aliansi ini bisa terus dilestarikan.

Kesepakatan ini mengantarkan pada perkawinan politik dan agama, walaupun sebenarnya —mungkin tanpa disadari— agama menjadi tumbal di dalamnya, dan para penganut agama —yang pa-

hamnya berbeda— menjadi korban berikutnya. Kelak terbukti bahwa, walaupun tidak sampai menyebabkan perceraian, perkawinan ini sangat duniawi. Hal ini terlihat dalam pemberontakan pengikut fanatik Wahabi di Haram pada tahun 1979 yang telah merusak banyak bagian Masjidil Haram—muncul sebagai protes terhadap kebiasaan buruk keluarga kerajaan yang menyimpang dari ajaran Wahabi namun tetap mendapat dukungan ulama Wahabi sekalipun perilaku mereka tidak benar.

Secara umum, Wahabi sebenarnya bertentangan dengan semangat Islam sendiri. Tabi'atnya yang keras, suka memvonis musyrik, kafir, dan murtad terhadap sesama Muslim, serta aksi-aksi destruktif yang gemar mereka lakukan adalah bukti yang sulit ditolak. Perbuatan mereka seutuhnya bertentangan dengan pandangan para ulama *Aswaja* seperti ditegaskan dalam kaedah *fiqh* bahwa, menolak kerusakan, kekacauan, kekejaman dan semacamnya (*mafsâdah*) harus lebih didahulukan daripada mewujudkan kesejahteraan (*dar' al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashlâlih*). Dalam hal ini, Wahabi justru gemar melakukan *mafsâdah* demi —menurut mereka— mewujudkan *mashlâhah* (versi Wahabi).

Andai pun aksi-aksi mereka bisa diterima, ini pun sangat bertentangan dengan kerangka dasar kaedah *fiqh* yang lazim jadi pedoman para ulama *Aswaja* bahwa, jika menghadapi bahaya-bahaya yang luar biasa, maka mengatasinya adalah dengan menanggung bahaya paling kecil (*yudfa'u asyaddu al-dlarûrain bi tahammuli akhaffihimâ*). Wahabi malah menyelesaikan masalah dengan masalah, dan melahirkan banyak masalah baru.

Sedangkan kegemaran mereka mengkafirkan sesama Muslim jelas merupakan pembangkangan terhadap peringatan Kanjeng Nabi Muhammad saw. bahwa, “Siapa pun yang menuduh saudaranya yang Muslim sebagai kafir, dia sendiri adalah kafir.” Pada kenyataannya, tuduhan musyrik, kafir, dan murtad adalah berdasarkan paham Wahabi. Di sini terlihat dengan jelas bahwa Wahabi telah menjelma menjadi ‘agama’ di dalam agama.

Fakta-fakta kekejaman Wahabi ini membuat umat Islam yang berpaham *Ahlussunnah wal-jamâ'ah*, yang berpegang teguh pada ajaran untuk bersikap toleran dan moderat serta mendahulukan kebersamaan dan kedamaian dengan siapa pun, menolak paham Wahabi. Karena itu pula Sultan 'Utsmani merasa wajib menghentikan gerakan Wahabi dan berusaha menguburnya.

Keputusan Sultan 'Utsmani ini, selain dilandasi alasan politik, juga pertimbangan agama. Ketika Muhammad 'Ali Pasya berhasil menangkap para tokoh Wahabi, mereka diajak berdialog untuk mencari dan membuktikan kebenaran di antara mereka. Ajakan ini tidak berhasil karena tokoh-tokoh Wahabi berkepala batu dan tidak bisa menerima pandangan-pandangan yang berbeda dari paham mereka, apalagi yang bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa, bagi orang-orang Wahabi, paham mereka sudah merupakan kebenaran, dan ini tak bisa lain kecuali menganggap pahamnya sebagai 'agama' itu sendiri. Dan persis karena alasan itulah para penganut ajaran Wahabi menganggap Muslim non-Wahabi sebagai kafir.

Pada masa formatifnya, Wahabi selalu ditentang secara terbuka oleh umat Islam di daerah Hijaz dan sekitarnya. Hal ini terjadi karena ajaran Wahabi dengan jelas bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana diamalkan oleh umat Islam di daerah-daerah tersebut. Ekstremitas dan teror yang mereka lakukan, belum lagi pemaknaan harfiah secara tertutup atas teks-teks suci Islam, telah membuat umat Islam sadar akan bahaya-bahaya laten yang dikandung Wahabi. Perselisihan antara Ibn 'Abdul Wahab dan ayahnya, penolakan oleh Sulaiman kakak kandung Ibn 'Abdul Wahab, serta penentangan oleh Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan, Mufti Makkah pada masanya, adalah bukti kongkret penolakan terhadap Wahabi.

Namun setelah Wahabi menguasai Makkah dan Madinah dan berhasil membangun kerajaan Saudi Arabia seperti dikenal sekarang, umat Islam daerah-daerah yang dikuasai Wahabi tidak

berani lagi menolak Wahabi secara terbuka. Bagi umat Islam di daerah-daerah dimaksud tidak ada pilihan lain kecuali menerima Wahabi, atau nyawa mereka akan melayang, karena Wahabi—seperti biasa—memaksa setiap Muslim menganut Wahabi. Penolakan secara terbuka hanya bisa terjadi di luar daerah kekuasaan Wahabi.

Contoh lain penolakan kontemporer secara terbuka dilakukan oleh Muslim Bosnia beberapa tahun yang lalu. Ingin memancing di air keruh, Wahabi hadir di tengah-tengah konflik bekas Yugoslavia tersebut dengan dalih ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk pembangunan sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan pengadaan buku-buku keagamaan. Setelah memperhatikan arsitektur masjid yang khas Wahabi (bersih dari ornamen seni arsitektural masjid pada lazimnya), kurikulum sekolah dan buku-buku pelajaran yang jelas-jelas berisi ajaran Wahabi, Muslim Bosnia sadar bahwa semua bantuan tersebut hanyalah *camouflage* usaha Wahabisasi Balkan. Sebagian terbesar Muslim Bosnia menolak bantuan-bantuan tersebut karena tahu semua itu akan merusak tradisi dan budaya keberagaman mereka yang selama berabad-abad dikenal beradab dan toleran.

Sebelumnya, penolakan dan kritik keras terhadap istana kerajaan Arab Saudi dilakukan oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Kebiasaan buruk keluarga istana al-Saud, seperti judi, minum, main perempuan, dan sebagainya, menjadi alasan Khomeini mengkritik penguasa kerajaan yang mengklaim sebagai Pelayan Dua Kota Suci (*Khâdim al-Haramain*) Islam. Ketika itu dia melontarkan gagasan penting, yakni pembebasan Makkah dan Madinah dari cengkeraman Wahabi dan menempatkannya di bawah pengelolaan dan pengawasan internasional. Sebagai pemimpin Iran, Khomeini mungkin punya agenda politik sendiri, tapi jelas gagasannya sangat penting dan berharga.

Pendudukan bersenjata atas Masjid al-Haram oleh Juhayman al-Utaybi dan para pengikutnya pada 1 Muharram 1400/20 Nopember 1979 serta kritik keras dan gagasan strategis Ayatullah

Khomeini telah membuat penguasa Wahabi-Saudi sadar bahwa borok-borok mereka terungkap secara telanjang ke dunia internasional. Hal ini sangat mengganggu dan menurunkan citra mereka sebagai *Khâdim al-Haramain*. Maka sejak 30 tahun yang lalu penguasa Wahabi-Saudi telah membelanjakan uang yang mungkin sudah lebih dari USD 90 milyar yang disalurkan melalui *Rabithat al-'Alam al-Islâmî*, *International Islamic Relief Organization (IIRO)*, dan yayasan-yayasan lain ke seluruh dunia untuk membela diri dan memperbaiki citra mereka melalui wahabisasi global.¹⁴ Di Indonesia, *Rabithat al-'Alam al-Islâmî* dan *IIRO* menyalurkan dananya –di antaranya– melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), LIPIA,¹⁵ MMI, Kompak, dan lain-lain.¹⁶

Seorang sayyid dan ulama non-Wahabi yang sejak nenek moyangnya telah tinggal di Hijaz, menuturkan kepada peneliti studi ini bahwa, “Bagi dunia Islam, Makkah dan Madinah laksana jantung. Jika jantung sehat, ia akan mengalirkan kesehatannya ke seluruh tubuh. Jika jantung sakit, ia akan mengalirkan sakitnya ke seluruh tubuh. Karena itu jantung harus sehat dan bersih. Sudah sejak sangat awal sekali para ulama besar telah berkunjung ke Makkah dan Madinah dan kembali ke kampung halamannya membawa pengaruh yang diterimanya selama di tanah suci tersebut.”¹⁷

Sebelum dikuasai Wahabi, kedua kota suci Makkah dan Madinah pernah menjadi pusat ibadah dan kegiatan belajar semua madzhab. Pada masa itu, madzhab-madzhab yang berbeda berdia-

14. Pemerintah Saudi sendiri mengakui bahwa hingga tahun 2003 sudah membelanjakan uang sebesar US\$ 70 M (Baca dalam: “How Billions in Oil Money Spawned a Global Terror Network,” dalam *US News & World Report*, 15 Desember 2003).

15. Noorhaidi Hasan, “Islamic Militancy, Sharia, and Democratic Consolidation in Post-Soeharto Indonesia,” Working Paper No. 143, S. Rajaratnam School of International Studies (Singapore, 23 October 2007).

16. Zachary Abuza, “Jemaah Islamiyah Adopts the Hezbollah Model,” dalam *Middle East Quarterly*, Winter 2009.

17. Interview peneliti pada tanggal 6 Juni 2007.

log secara terbuka dan dewasa, menikmati kebebasan untuk bersama-sama mencari kebenaran, bebas beribadah dan berkeyakinan sesuai dengan madzhab yang bersangkutan. Pada masa itu, para teolog (*mutakallim*), ahli hukum Islam (*fuqahâ*), para sufi (*mutashawwifin*), dan para ahli berbagai disiplin ilmu lainnya bertemu di kota suci tersebut. Mereka berbagi pandangan, berdialog, berdebat, serta memperdalam pemahaman dan memperkuat pengamalan agamanya. Mereka tinggal dalam rentang waktu yang lama untuk kepentingan ibadah dan belajar di kedua kota suci tersebut. Di samping mereka yang tinggal lama di tanah suci, ada para jamaah haji yang lazim memanfaatkan kesempatan selama musim haji untuk belajar dari para ulama berbagai madzhab, dan membawa pulang hikmah yang mereka peroleh selama di tanah suci.

Tokoh-tokoh besar seperti Abu Hanifah, Anas ibn Mâlik, Muhammad ibn Idris al-Syâfi'î, Ahmad ibn Hanbal, Abu Yazid al-Bisṭhami, Junaid al-Baghdadi, Abu Manshur al-Hallaj, al-Ghazali, Ibn Rusyd, Ibn 'Arabi, bahkan KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasjim Asy'ari termasuk di antara mereka yang berkesempatan belajar, berdialog dan berbagi pengetahuan dengan yang lain di tanah suci.

KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan KH. Hasjim Asy'ari (pendiri Nahdlatul Ulama) yang sempat belajar di jantung dunia Islam tersebut membawa pengaruh yang luar biasa ke Indonesia, walaupun organisasi yang digagas keduanya sangat jelas berbeda, keduanya tetap toleran dan saling menghormati, mengakui perbedaan sebagai keragaman dan kekayaan tradisi intelektual. Hal ini kontras dengan gerakan Padri yang digagas oleh Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arif yang telah menunaikan ibadah haji ketika Wahabi menguasai kedua kota suci pada awal abad kesembilan belas. Virus Wahabi yang menjangkiti ketiga haji tersebut terbawa ke Sumatera Barat dan telah memicu perang saudara dan sesama Muslim yang sangat tragis dalam sejarah Islam Nusantara.

Wahabi sebenarnya tidak hanya ditolak oleh umat Islam saja.

Banyak non-Muslim di Barat yang menolak dan membenci Islam karena adanya aksi-aksi terorisme yang dilakukan atas nama Islam. Padahal, umat Islam non-Wahabi juga menolak dan mengutuk aksi-aksi terorisme tersebut. Andai Barat tahu bahwa pelaku terorisme tersebut adalah para penganut sekte Wahabi dan sekutu ideologisnya, tentu bukan Islam yang akan mereka benci. Sekali lagi, dalam kasus ini terlihat jelas Islam menjadi tumbal dalam usaha Wahabisasi global.

Terjadinya berbagai penolakan tidak membuat Wahabi kehilangan akal. Ditolak dalam Wahabisasi secara terbuka, mereka berusaha menyusup secara samar dan tersembunyi ke berbagai belahan dunia Islam, termasuk Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dalam kasus Indonesia, penyusupan yang mereka lakukan tidaklah sendirian, ada kelompok-kelompok lokal yang menjadi kaki tangan Wahabi, atau secara umum memang mempunyai orientasi dan tujuan sama, yakni formalisasi Islam, yang menjadi agen penyebaran paham Wahabi.

Gerakan Transnasional di Indonesia

Relasi antara Wahabi dan kelompok-kelompok garis keras lokal memang tidak bisa sepenuhnya ditunjukkan secara organisatoris-struktural, karena lazimnya mereka malu disebut kaki tangan Wahabi. Di samping ada kontak-kontak langsung dengan tokoh-tokoh garis keras transnasional, relasi mereka juga berdasarkan kesamaan orientasi, ideologi, dan tujuan gerakan. Berbagai kelompok garis keras ini bekerjasama dalam beragam aktivitas yang mereka lakukan. Lazimnya, kelompok-kelompok ini memiliki relasi dengan organisasi transnasional yang diyakini berbahaya dan mengancam Pancasila, NKRI, dan UUD 1945, di samping juga merupakan ancaman serius terhadap Islam Indonesia yang santun dan toleran.

Di antara gerakan-gerakan transnasional yang beroperasi di Indonesia adalah, 1) Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan

al-Banna di Mesir hadir di Indonesia pada awalnya melalui lembaga-lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi Gerakan Tarbiyah. Kelompok ini kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);¹⁸ 2) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan gagasan Pan-Islamismenya yang ingin menegakkan Khilafah Islamiyah di seluruh dunia, dan menempatkan Nusantara sebagai salah satu bagian di dalamnya; dan 3) Wahabi yang berusaha melakukan wahabisasi global. Di antara ketiga gerakan transnasional tersebut, Wahabi adalah yang paling kuat, terutama dalam hal pendanaan karena punya banyak sumur minyak yang melimpah. Namun demikian, ketiga gerakan transnasional ini bahu-membahu dalam mencapai tujuan mereka, yakni formalisasi Islam dalam bentuk negara dan aplikasi syari'ah sebagai hukum positif atau Khilafah Islamiyah.

Kehadiran Wahabi di Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari peran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dengan dukungan dana besar dari Jama'ah Salafi (Wahabi), DDII mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke Timur Tengah, sebagian dari mereka inilah yang kemudian menjadi agen-agen penyebaran ideologi Wahabi-Ikhwani Muslimin di Indonesia. Belakangan, dengan dukungan penuh dana Wahabi-Saudi pula, DDII mendirikan LIPIA dan kebanyakan alumninya kemudian menjadi agen Gerakan Tarbiyah dan Jama'ah Salafi di Indonesia. Dibandingkan dengan HTI, Wahabi memang jauh lebih dekat dengan Ikhwani Muslimin. Kedekatan ini berawal pada dekade 1950-an dan 1960-an ketika Gamal Abdel Nasser membubarkan Ikhwani Muslimin yang ekstrem dan melarang semua kegiatannya di Mesir. Banyak dari tokoh-tokoh Ikhwani Muslimin saat itu melarikan diri meninggalkan negaranya.

18. Untuk informasi memadai tentang Ikhwani Muslimin dan PKS, baca buku Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. Ke-5, 2007).

Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Pada dekade ini Mesir dan Palestina dijajah Inggris, Maghreb dan Syria dijajah Prancis, sedangkan Libya dijajah Itali. Secara ideologis, penjajah Timur Tengah ini bisa dilihat dalam beberapa aliran. Inggris menganut liberalisme, sedangkan Itali yang sudah dikuasai Mussolini menganut fasisme. Fasisme (*Fascism*) berasal dari *facses* (Latin) atau *fascio* (Italia) yang adalah simbol otoritas Roma dan berarti batang-batang kecil yang diikat dalam satu-kesatuan dan karena itu sulit dihancurkan atau dipatahkan. Dengan kata lain, fasisme adalah simbol kekuatan melalui persatuan.

Tujuan Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin, di antaranya, adalah untuk melawan penjajah, mengatasi kemunduran peradaban Islam, dan membawa umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni. Sayangnya, al-Banna dan para pengikutnya tampak meyakini bahwa ideologi dan sistem gerakan fasisme Itali-Mussolini dan komunisme-Uni Soviet lebih berguna dalam mencapai tujuannya daripada liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan bagi setiap orang untuk mencari kebenaran dan mengamalkan ajaran agamanya. Di samping itu, al-Banna juga berkenalan dengan gagasan Wahabi, dan sejak awal sekali pola pikir totalitarianisme-sentralistik fasisme, komunisme dan Wahabisme sudah ada dalam DNA Ikhwanul Muslimin.

Secara faktual bisa dikatakan, Ikhwanul Muslimin adalah anak kandung ideologi Barat yang sekaligus memusuhi induknya. Dari fasisme-Mussolini Itali, Ikhwanul Muslimin mengadopsi sistem totalitarianisme dan negara sentralistik, namun menolak nasionalisme. Dari komunisme-Uni Soviet, mereka mengadopsi totalitarianisme, sistem penyusupan dan perekrutan anggota (*cell system*), strategi gerakan, dan internasionalisme, namun menolak ateisme. Berdasarkan fakta ini beberapa ahli menyebut Ikhwanul Muslimin dan garis keras lainnya sebagai Islamofasisme, yakni se-

buah gerakan politik yang bertujuan mewujudkan kekuasaan mutlak berdasarkan pemahaman mereka atas al-Qur'an.¹⁹

Dalam membangun gerakan, Ikhwanul Muslimin menggunakan jaringan tarekat yang saat itu sangat banyak dan subur di Mesir. Bahkan hingga bisa dikatakan bahwa Ikhwanul Muslimin sendiri pada masa transformatifnya adalah sebuah tarekat namun dengan tujuan politik, bukan spiritual sebagaimana layaknya tarekat tasawuf. Maka dalam waktu yang relatif cepat, Ikhwanul Muslimin berhasil merekrut ratusan ribu anggota. Memang, salah satu motif awal Ikhwanul Muslimin adalah untuk melawan penjajah Inggris di Mesir dan tidak keras terhadap Muslim yang lain. Namun, karena watak dasar gerakan ini bersifat politis yang dikemas dengan busana agama, gairah politik sudah melekat erat dalam DNA gerakan ini. Motif politik dan keinginan merebut kekuasaan dengan semangat fasisme-komunisme ini membuat Ikhwanul Muslimin sering terlibat konflik dengan penguasa.

Berakhirnya penjajahan Inggris ternyata tidak menjadi peluang emas bagi Ikhwanul Muslimin untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Merasa punya andil dalam usaha mengakhiri penjajahan, namun kemudian tidak berhasil secara politik, membuat Ikhwanul Muslimin menjadi keras dan fanatik. Hal ini mempertajam konflik dengan pemerintah ketika itu –termasuk pembunuhan Perdana Menteri Mesir, Mahmud an-Nukrashi Pasha pada Desember 1948– dan menyebabkan terbunuhnya pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna oleh pemerintah Mesir.

Terbunuhnya Hasan al-Banna tidak membuat Ikhwanul Muslimin ikut mati, tapi semakin keras dan fanatik. Kegagalan politik Ikhwanul Muslimin ini bertemu dengan kekecewaan para opsir muda yang tidak sejalan dengan Raja Faruk ketika itu. Ikhwanul

19. Gerakan-gerakan revivalis Islam pada umumnya, termasuk Ikhwanul Muslimin di antaranya, menginginkan kembalinya “masa keemasan” Islam, yakni masa Nabi Muhammad saw. dan empat khalifah pertama, ketika kekuasaan berada di satu tangan penguasa tertinggi, khalifah.

Muslimin tidak menyalahkan peluang politik ini dengan mendukung gerakan para opsir yang berniat melakukan pemberontakan.

Keberhasilan pemberontakan para opsir (*Free Officers Revolution*) kembali terbukti tidak menjadi peluang bagi Ikhwanul Muslimin untuk meraih kekuasaan politik di Mesir, karena ideologi Ikhwanul Muslimin maupun gerakan para opsir memang berseberangan sejak awal. Gamal Abdel Nasser, salah seorang opsir yang terlibat dalam pemberontakan pada tahun 1954 dan kemudian menjadi Presiden Mesir pada tahun 1956, tidak mau berbagi kekuasaan dengan Ikhwanul Muslimin dan bergerak dengan gagasannya sendiri, Pan-Arabisme berdasarkan sosialisme. Ikhwanul Muslimin kecewa dan merasa dikhianati.

Sayyid Qutb, yang menjadi ideolog dan salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin setelah al-Banna dibunuh, merasa penguasa ketika itu telah berbuat kejam dan aniaya. Kekecewaan politik Ikhwanul Muslimin membuat Qutb dan pemimpin yang lain bersikap lebih agresif terhadap lawan-lawan politiknya. Ditangkap dan disiksa di penjara, Qutb menyerang penguasa Mesir melalui tulisan-tulisannya, dan menuduh siapa pun yang tidak mengikuti ideologi kerasnya sebagai murtad, kafir, dan halal darahnya. Karyanya sarat dengan gagasan-gagasan seperti takfir, fir'aun, serta jahiliah modern, yang dia gunakan untuk mengkategorikan siapa pun yang tidak sejalan dengan ideologinya. Di samping pengaruh gerakan Hizbut Tahrir yang dia peroleh dari pertemuannya dengan tokoh Hizbut Tahrir selama di penjara, semua ini jelas merupakan pengaruh Wahabisme. Di samping itu, gagasan-gagasan seperti *revolutionary-vanguard* dan *international movements* juga bermunculan dalam karya-karya Qutb, yang jelas merupakan pengaruh komunisme yang masih kuat pada masa itu.

Dalam tulisan-tulisan Qutb jelas terlihat bahwa para pengikut ideologinya harus memperjuangkan kekuasaan proletariat, supremasi ummah/syari'ah, serta terwujudnya negara Islam dan

akhirnya khilafah yang sentralistik melalui *revolutionary-vanguard*, yaitu para pemimpin garis keras pengikut ideologi Qutb. Gagasan-gagasan Qutb ini mengilhami para pembacanya dari kalangan garis keras melakukan aksi-aksi kekerasan dan mengancam keselamatan jiwa para pejabat negara dan rakyat serta mengacaukan situasi politik tidak hanya di Mesir ketika itu, tetapi di seluruh dunia hingga dewasa ini. Secara ringkas bisa dikatakan, tulisan-tulisan Qutb mengilhami para pengikut ideologinya menggunakan kekerasan untuk meraih kekuasaan.

Perkawinan Wahabi-Ikhwani Muslimin

Tulisan-tulisan Qutb yang bernada menghasut membuat dia dieksekusi pada tahun 1966. Memang sejak tahun 1954 banyak pemimpin Ikhwani Muslimin selain Qutb dijebloskan ke penjara oleh Nasser. Langkah represif penguasa Mesir ini membuat banyak tokoh dan anggota Ikhwani Muslimin merasa tidak aman lagi tinggal di Mesir, dan Arab Saudi menjadi alternatif menarik. Di antara mereka yang melarikan diri ke Arab Saudi adalah Said Ramadan yang termasuk salah seorang pendiri Rabithath al-'Alam al-Islami. Said Ramadan —menantu Hasan al-Banna— kemudian pindah ke Jenewa dan membawa Ikhwani Muslimin ke Eropa dengan dukungan dana Wahabi untuk menguasai umat Islam Eropa agar menjadi pengikut ideologi Wahabi-Ikhwani Muslimin. Tariq Ramadan putranya, cucu Hasan al-Banna melalui ibunya, sekarang adalah tokoh intelektual terkenal di Eropa.

Pada tahun 1960-an, Arab Saudi mengundang para tokoh Ikhwani Muslimin —termasuk di antaranya adalah adik kandung Sayyid Qutb, yaitu Muhammad Qutb— untuk menyelamatkan diri ke Saudi. Muhammad Qutb kemudian menjadi dosen di King Abdulaziz University, Jedah, dan mengajar Osama bin Laden di antara murid lainnya.

Sikap Saudi ini merupakan refleksi ketakutan penguasa Wahabi atas gerakan Pan-Arabisme Gamal Abdel Nasser yang

berdasarkan sosialisme dan jelas merupakan ancaman terhadap dominasi ideologis Wahabi-Saudi. Dengan mengundang Ikhwanul Muslimin, Saudi ingin sekali kayuh melampaui dua hingga tiga pulau. Pertama, Ikhwanul Muslimin yang merupakan musuh Gamal Abdel Nasser bisa menjadi sekutu strategis melawan Pan-Arabisme—Sosialisme Nasser. Kedua, para anggota Ikhwanul Muslimin yang terpelajar bisa membantu Saudi membangun dan memperkuat sistem penyebaran Wahabi ke negara lain di Timur Tengah dan akhirnya ke seluruh dunia (Wahabisasi global).

Pada dekade 60-an ini, perkawinan Wahabi-Ikhwanul Muslimin terjadi dan melahirkan keturunan gerakan garis keras yang banyak di seluruh dunia hingga dewasa ini. Keduanya berbagi fanatisme ideologis, ambisi kekuasaan sentralistik, orientasi internasional, dan formalisasi agama. Wahabi sendiri mempunyai dana besar—terutama setelah harga minyak melangit pada tahun 1973—namun kurang atau tidak terdidik, sedangkan Ikhwanul Muslimin cukup terdidik namun tidak punya dana memadai. Kelak terlihat, perkawinan ini memang sangat strategis dan darinya lahir gerakan internasional dengan ideologi, sistem, dan dana yang kuat serta terus berkembang dan meluaskan diri ke seluruh dunia hingga dewasa ini.

Akhir 1970-an dan awal 1980-an merupakan suasana menegangkan bagi penguasa Saudi. Keberhasilan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, ditambah pemberontakan Juhayman al-Uteybi dan anak buahnya yang menduduki Masjidil Haram pada tahun yang sama, sudah cukup membuat penguasa Saudi sangat terancam. Pada dekade ini Presiden Mesir, Anwar Sadat terbunuh; dan Uni Soviet menguasai Afghanistan. Pada dekade 1980-an proyek Wahabisasi global dengan dukungan dana (Saudi) dan sistem (Ikhwanul Muslimin) bergerak jauh lebih cepat. Hal ini dilaksanakan melalui yayasan-yayasan Wahabi seperti Rabithath al-'Alam al-Islami, al-Haramain, International Islamic Relief Organization (IIRO), dan banyak lainnya. Kelak al-Haramain ini menjadi terkenal saat

PBB menyebutnya sebagai “terrorist-funding entity” yang membiayai aksi-aksi teror di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia.

Perang Afghanistan melawan Uni Soviet memikat banyak anggota garis keras dari seluruh dunia, termasuk pendiri Laskat Jihad, Ja‘far ‘Umar Thalib, dan beberapa pelaku kampanye teror Jamaah Islamiyah, termasuk Hambali, Imam Samudra, dan Ali Ghufron. Bahkan, Jamaah Islamiyah —yang didirikan oleh mantan anggota Darul Islam, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir— punya kaitan erat dengan al-Qaeda melalui Hambali, yang sebelum ditangkap termasuk pengurus inti al-Qaeda.

Secara struktural, para pengurus inti al-Qaeda beretnik Arab dan berasal dari Timur Tengah kecuali Hambali. Hambali adalah komandan militer Jamaah Islamiyah yang berjuang untuk menyalakan NKRI dan menggantinya dengan khilafah internasional. Jamaah Islamiyah bertanggung jawab atas banyak peledakan bom di Indonesia seperti pemboman hotel Marriott, Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bandara Soekarno-Hatta, Bom Bali, pemboman di berbagai gereja, dan usaha pembunuhan Duta Besar Filipina. Bahkan, bom di Masjid Istiqlal yang berskala kecil termasuk aksi Ji sebagai usaha menumbuhkan sentimen keagamaan bahwa ada serangan terhadap Islam Indonesia.

Al-Qaeda adalah keturunan lain dari perkawinan Wahabi-Ikhwani Muslimin, yang jelas terlihat dari kehadiran para Wahabi-Saudi yang dipimpin Osama bin Laden (murid Muhammad Qutb) dan Ayman al-Zawahiri bersama para pengikutnya. Al-Zawahiri yang sudah menjadi anggota Ikhwani Muslimin sejak berusia 14 tahun sangat kuat dipengaruhi Sayyid Qutb, dan adalah pemimpin kedua al-Jihad —dikenal dengan nama *Egyptian Islamic Jihad*— yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Presiden Mesir, Anwar Sadat pada tahun 1981.

Hizbut Tahrir

Mengaku kecewa dengan Ikhwani Muslimin yang dituding

terlalu moderat dan terlalu akomodatif terhadap Barat, Taqiuddin al-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir pada tahun 1952 di Jerusalem Timur yang dikuasai Yordania. Menurut al-Nabhani, umat Islam —ketika itu— sudah dicemari pemikiran dan emosi kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan sektarianisme. Karena itu dia berambisi mendirikan Khilafah Islamiyah internasional yang akan diawali dari teritori Arab dan kemudian teritori Islam non-Arab. Setelah al-Nabhani wafat pada tahun 1977, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abu Yusuf Abdul Qadim Zallum yang wafat pada tahun 2003 dan kemudian digantikan oleh Ata Ibn Khaleel Abu Rashta. Radikalisme dan sikap agresif Hizbut Tahrir terus meningkat sejak pendiriannya hingga dewasa ini, karena itu Hizbut Tahrir dilarang di kebanyakan negara Islam di seluruh dunia, dan pusat gerakan internasionalnya sekarang berada di Inggris.²⁰

Hizbut Tahrir mengklaim bahwa gagasan-gagasan yang mereka perjuangkan adalah murni Islam. Klaim ini tidak bisa dipisahkan dari situasi pada masa pendirian dan formatifnya di Timur Tengah serta penolakan sepenuhnya terhadap apa pun yang berasal dari atau berkaitan dengan Barat. Padahal, menurut Ed Husain (seorang mantan pemimpin Hizbut Tahrir di Inggris), di samping pengaruh al-Mawardi, pemikiran al-Nabhani jelas dipengaruhi oleh Hegel, Rousseau dan tokoh-tokoh Eropa lainnya. Bahkan, pemikiran politik al-Nabhani —dan dengan demikian Hizbut Tahrir— sepenuhnya berasal dari pemikiran politik Eropa. Hanya saja, al-Nabhani mengganti term-term yang berasal dari Barat dengan term-term berbahasa Arab sehingga bernuansa Islam.²¹

Para tokoh Hizbut Tahrir melihat umat Islam dewasa ini berada dalam masa *jahiliyyah* sebagai akibat runtuhnya khilafah. Mere-

20. Zeyno Baran, *Hizb ut-Tahrir: Islam's Political Insurgency* (Washington: Nixon Center, 2004), h. 16-17.

21. Ed Husain, *The Islamist* (London: Penguin Books, 2007), h. 161-164. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Matinya Semangat Jihad: Catatan Perjalanan Seorang Islamis* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).

ka bisa mengatasinya dengan mengakhiri ‘ketundukan’ pada Barat, memperoleh kembali identitas kolektifnya, dan yang terpenting menegakkan kembali khilafah internasional dan di dalamnya hukum Islam akan diberlakukan sebagai hukum positif. Dalam kaitan ini, Hizbut Tahrir meyakini bahwa hanya khalifah yang berhak memutuskan perang, karena itu hingga saat ini mereka menjalankan strategi penyusupan dan menunda cara-cara militer dan kekerasan dalam meraih kekuasaan,²² sampai mereka yakin akan menang dan berhasil dalam merebut kekuasaan untuk mendirikan khilafah mereka.

Ada tiga tahap perjuangan Hizbut Tahrir dalam usaha menegakkan khilafah internasional. *Pertama*, membangun partai (*hizb*). Pada tahap ini para agen Hizbut Tahrir melakukan rekrutmen anggota baru, mereka membinanya dalam kurun waktu yang bisa berlangsung selama enam bulan hingga tiga tahun, tergantung pada progres masing-masing mereka. Tahap ini bisa dikatakan sebagai proses cuci otak dan pembentukan pribadi Islami *a la* Hizbut Tahrir, biasanya dilakukan dalam *halaqah-halaqah*. Pada tahap ini tokoh atau anggota Hizbut Tahrir juga akan membuka hubungan dengan umat untuk menyampaikan gagasan dan metode perjuangan mereka secara pribadi.

Kedua, berinteraksi dengan masyarakat. Dalam tahap ini, anggota yang telah lulus dari tahap pertama membentuk sel-sel baru dan mulai aktif mengaitkan kasus-kasus lokal dengan masalah-masalah global dan membakar massa untuk membangun ketegangan sosial antara rakyat dan pemerintah, untuk kemudian mulai menawarkan jalan Islam sebagai alternatif keluar dari ketegangan yang telah dibangunnya. Target utama mereka adalah untuk menyusup ke dalam pemerintahan dan militer, agar kelak melapangkan jalan dalam merebut kekuasaan.²³ Di seluruh dunia, tahap kedua inilah yang paling banyak beroperasi, dan agen-agen Hizbut Tahrir

22. Zeyno Baran (2004), h. 19-20.

23. Zeyno Baran (2004), h. 20-23.

sudah aktif di lebih 40 negara, termasuk Indonesia di mana pada 12 Agustus 2007 mereka mengumpulkan lebih dari 80 ribu orang di Gelora Bung Karno untuk menyerukan pendirian Khilafah Islamiyah dan melenyapkan Pancasila dan NKRI.

Ketiga, merebut kekuasaan. Tahap terakhir ini akan dilancarkan setelah mereka yakin akan menang dan berhasil merebut kekuasaan, yang antara lain akan ditandai dengan tingkat keberhasilan mereka menyusup ke dalam pemerintahan dan militer. Setelah berkuasa, mereka siap memaksakan penafsiran tentang Islam *a la* Hizbut Tahrir dalam semua bidang kehidupan umat manusia.²⁴

Secara umum, sebagai akibat dari obsesi ideologi politik mereka, Hizbut Tahrir hampa spiritualitas sehingga gerakan yang dibangunnya kering dan cenderung supremasis. Bahkan, dalam banyak kasus, mayoritas aktivis Hizbut Tahrir tidak mengerti tentang Islam dan hanya mengetahui aspek-aspek yang sangat artifisial. Sangat ironis, bagaimana mungkin mereka yang tidak mengerti tentang Islam akan memperjuangkan Islam.²⁵ Lemahnya pemahaman yang mendalam ini menjadi penyebab utama mereka terlena dan tergoda memperjuangkan gagasan yang dikemas dalam term-term Arab yang identik dengan Islam. Secara umum, retorika kelompok-kelompok seperti ini adalah pengantar pada aksi-aksi kekerasan. Di dalamnya agama telah dimanipulasi sedemikian rupa untuk menyediakan dorongan teologis bagi para pengikut garis keras agar bersedia melakukan apa pun, hingga membunuh atau bunuh diri sekalipun jika dibutuhkan, demi mencapai tujuan politik mereka.

24. PBNU memperingatkan bangsa Indonesia akan bahaya gerakan transnasional karena bertentangan dengan dan mengancam kelestarian tradisi keberagaman dan paham *Ahlussunnah wal-jamâ'ah*, Pancasila, dan NKRI (baca lampiran 2).

25. Ed Husain (2007), h. 146-149 dan 208-209.

Tiga Aspek Kekerasan

Ketiga gerakan transnasional ini (Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir), hadir di Indonesia baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Dengan ideologinya yang kaku, keras, dan ekstrem, didukung kekuatan dana dan sistem penyusupan *a la* komunisme, gerakan-gerakan transnasional ini menyusup ke hampir semua bidang kehidupan bangsa Indonesia. Ketiganya berusaha mengubah wajah Islam Indonesia yang umumnya santun dan toleran agar seperti wajah mereka yang sombong, garang, kejam, penuh kebencian, dan merasa berhak menguasai. Kekerasan yang mereka lakukan bisa dilihat dalam beberapa aspek.

Pertama, kekerasan doktrinal, yakni pemahaman literal-tertutup atas teks-teks keagamaan dan hanya menerima kebenaran sepihak. Dalam hal ini, literalisme-tertutup telah memutus relasi kongkret dan aktual pesan-pesan luhur agama dari realitas sejarah, sosial, dan kultural. Akibatnya, pesan-pesan luhur agama diamputasi sedemikian rupa dan hanya menyisakan organ yang sesuai dengan ideologi mereka.

Kedua, kekerasan tradisi dan budaya, dampak turunan dari yang pertama. Kebenaran sepihak yang dijunjung tinggi membuat mereka tidak mampu memahami kebenaran lain yang berbeda, dan praktik-praktik keagamaan umat Islam yang semula diakomodasi kemudian divonis sesat, dan pelakunya divonis musyrik, murtad, dan/atau kafir. Kelompok-kelompok garis keras menolak eksistensi tradisi, karena itu mereka lazim menolak bermadzhab (*allā madzhabiyyah*), menolak tradisi tasawuf, dan berbagai praktik yang merupakan buah dari komunikasi teks-teks atau ajaran luhur agama dengan tradisi dan budaya umat Islam di berbagai daerah sepanjang sejarah. Akibatnya, terjadi salah kaprah dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dengan dalih meniru Kanjeng Nabi, para anggota garis keras berpakaian *a la* busana Arab seperti gamis dan sorban, memanjangkan jenggot, namun mereka abai atas akhlak Kanjeng Nabi, seperti santun, sabar, rendah hati, pemaaf, dan seterusnya.

Ketiga, kekerasan sosiologis, dampak lanjutan dari dua kekerasan pertama, yakni aksi-aksi anarkis dan destruktif terhadap pihak lain yang dituduh musyrik, murtad, dan/atau kafir. Kekerasan sosial ini kemudian menyebabkan ketakutan, instabilitas, dan kegelisahan sosial yang mengancam negara di manapun tempat mereka menyusup. Dan akumulasi dari ketiga kekerasan ini kemudian merusak nalar dan logika umat Islam, menyuburkan kesalahkaprahan dalam memahami Islam akibat jargon-jargon teologis yang diteriakkan dengan tidak semestinya. Kebenaran, kemudian, lebih didasarkan pada jargon ideologis, bukan pada substansi pesan luhur agama yang disimbolkan oleh jargon yang bersangkutan.

Menurut seorang pejabat tinggi Departemen Pertahanan Republik Indonesia (Dephan RI), ancaman terhadap Indonesia tidak datang dalam bentuk militer dari luar negeri. Ancaman yang sebenarnya justru berada di dalam negeri, dalam bentuk gerakan ideologi garis keras. Senjata untuk mengatasinya adalah Pancasila.²⁶

Motivasi Agen Garis Keras

Afiliasi tokoh-tokoh atau individu-individu aktivis garis keras lokal dengan salah satu gerakan transnasional tersebut terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti keuntungan finansial, kesempatan untuk mendapat kekuasaan, lingkungan dan/atau dislokasi sosial, dan/atau lemahnya pemahaman atas ajaran agama, terutama dalam hal spiritualitas.

Faktor finansial merupakan bisnis terselubung gerakan garis keras. Seorang mantan tokoh Laskar Jihad di Indonesia secara terbuka menyatakan kepada peneliti kami, ketika aktif dalam gerakan dia mendapat tunjangan tak kurang dari Rp 3 juta setiap bulan. Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, godaan materi ini sangat berpengaruh bagi mereka yang masih lemah imannya. Hal ini

26. Penjelasan pejabat Tinggi Departemen Pertahanan Republik Indonesia (Dephan RI) kepada peneliti konsultasi pada tanggal 31 Juli 2008.

bisa dimengerti, dana yang sangat besar memang bisa menghanyutkan iman dan menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan para agennya. Keuntungan finansial ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para petualang yang ingin mendapat keuntungan instan tanpa perlu bekerja keras.

Orang-orang yang merasa punya kemampuan namun tidak punya peran sosial yang diimpikan, sering menemukan aktualisasi diri dalam kelompok-kelompok garis keras. Di dalamnya mereka mendapatkan peran dan posisi penting karena mampu merekrut dan mengatur pengikutnya serta menarik perhatian publik. Semakin banyak memperoleh pengikut dan sering muncul dalam liputan pers, semakin terpuaskan keinginannya untuk dianggap penting dan mendapat perhatian publik. Sepertinya publikasi pers menjadi pemuas impian yang telah lama tak tercapai untuk menjadi orang penting dan terkenal. Hal ini terlihat jelas antara lain dalam sebuah interview kolumnis asing dengan salah seorang Pimpinan kelompok garis keras pada bulan April 2007.²⁷

Namun faktor terpenting dan barangkali menjadi alasan kebanyakan orang terpesona dengan gerakan garis keras adalah dangkalnya pemahaman mereka tentang agama (baca: ajaran Islam). Jargon-jargon garis keras seperti membela Islam, penerapan syari'ah, maupun penegakan Khilafah Islamiyah, bagi umat Islam yang tidak mempunyai pemahaman mendalam tentang ajaran agamanya bisa menjadi ungkapan yang sangat ampuh dan mempesona. Pada saat yang sama, para penolak jargon-jargon tersebut bisa dengan mudah dituduh menolak syari'ah, bahkan menolak Islam. Tuduhan semacam ini lazim dilontarkan oleh orang-orang yang merasa sok tahu tentang Islam, mereka yang merasa sebagai yang paling benar dalam memahami Islam. Sikap arogan ini membuat mereka lebih

27. Interview Bret Stephens dengan Muhammad Rizieq Shihab, di Petamburan pada 17 April 2008 (artikel lengkap "The Arab Invasion: Indonesia's Radicalized Muslims Aren't Homegrown," bisa dibaca dalam: <http://www.opinionjournal.com/columnists/bstephens/?id=110009951>).

suka menyalahkan siapa pun yang tidak sama dengan dirinya, dan tidak mampu melakukan introspeksi. Sikap demikian lahir karena tidak adanya sikap *berislam* secara sejati, sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt. dan rendah hati sepenuhnya sebagaimana pesan utama Islam sendiri. Dangkalnya pemahaman ini menjelma menjadi kesalahkaprahan akut, mereka tidak mampu membedakan antara sumber ajaran Islam dari pemahaman atas sumber ajaran tersebut. Mereka juga tidak mampu mengurai kompleksitas relasi antara ajaran agama dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Dalam hal ini, agama yang mengandung pesan-pesan luhur dan sangat menekankan akhlak mulia, kemudian direduksi menjadi seperangkat diktum yang tak berperasaan berdasarkan batasan-batasan ideologis dan/atau platform partai.

Sungguh sayang, sementara beberapa umat Islam —baik yang awam maupun yang berpendidikan tinggi— telah dengan tulus mendukung agenda garis keras semata karena terpesona dengan jargon-jargon yang mereka gunakan, para tokohnya terus membangun simbiosis mutualistik —dengan para oportunist, individu yang sangat dangkal pemahamannya tentang Islam, atau yang idealis— yang darinya keuntungan personal diperoleh. Bukanlah sebuah kebetulan bahwa ada kelompok-kelompok garis keras yang merekrut anggota baru dengan sistem sel seperti dilakukan Ikhwanul Muslimin dan HTI, karena dengan cara demikian mereka bisa lebih mudah dan efektif mengendalikan pengikutnya. Pergerakan dengan sistem sel merupakan media paling mudah untuk reorientasi, atau cuci otak, berdasarkan ideologi gerakan mereka. Di samping itu, keanggotaan berjenjang dan tertutup ini juga ampuh membungkam pertanyaan para anggota baru atas hal-hal yang bersifat sensitif, termasuk masalah finansial.

Gayung bersambut, baik Wahabi maupun para petualang lokal sama-sama mendapat keuntungan. Wahabi yang tidak bisa hadir secara terbuka —karena tentu akan ditolak oleh umat Islam yang mengerti sejarah dan ajaran mereka— untuk menanamkan

pahamnya di Indonesia, beruntung karena ada para petualang yang bersedia menjadi kaki tangannya untuk menyebarkan ideologi mereka. Sedangkan para petualang lokal mendapat keuntungan finansial dari aliran petrodolar yang luar biasa deras.

Terlepas dari alasan finansial tersebut, bersama-sama dengan Ikhwanul Muslimin dan HTI, Wahabi telah mempengaruhi umat Islam setempat dengan pahamnya yang ekstrem. Walaupun memiliki perspektif yang berbeda, termasuk dalam beberapa detail pemahaman keagamaan, tujuan akhir mereka mirip, yakni formalisasi Islam. Untuk mencapai tujuan ini, kelompok-kelompok garis keras menggunakan segala cara, bahkan yang bertentangan dengan ajaran Islam sekalipun. Fakta ini hanya menegaskan sebaliknya. Jika mereka memang memperjuangkan Islam, tentu mereka akan menghindari cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Prinsip yang lazim menjadi pegangan para ulama *Ahlussunnah wal-jamâ'ah* menegaskan bahwa tujuan tidak bisa membenarkan cara (*al-ghâyah lâ tubarrir al-washîlah* atau *Man kâna amruhu ma'rûfan fal-yakun bi ma'rûfin*). Artinya, cara tidak akan menjadi baik karena tujuannya baik; atau, siapa pun yang mempunyai tujuan baik hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. Tujuan baik, jika diusahakan dengan cara-cara buruk, tentu akan menodai kebaikan itu sendiri dan bertentangan.²⁸

Infiltrasi Ideologi Wahabi Pertama di Indonesia: Gerakan Padri

Selama beberapa dekade yang lalu, sebagaimana dipaparkan dalam pelajaran sejarah resmi di sekolah-sekolah, Perang Padri lebih dikenal sebagai perang melawan pendudukan penjajah Belanda. Para Padri dikenal sebagai pahlawan yang dengan gagah

28. "Man kâna amruhu ma'rûfan fal-yakun bi ma'rûfin," (Siapa pun yang melakukan kebaikan hendaknya [dilakukan] dengan cara-cara yang baik), penjelasan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj dalam *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil'Âlamîn*, episode 5: "Dakwah," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

berjuang/berperang membela tanah air. Sisi kekerasan dan afiliasi mereka dengan ajaran Wahabi sama sekali tidak terungkap dan hanya beredar di antara para ahli saja. Dalam hal ini, sangat berharga untuk mengetahui penggalan lain sejarah Gerakan Padri tersebut.

Gerakan Padri berawal dari perkenalan Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arif dengan Wahabi saat menunaikan ibadah haji pada awal abad ke-19, ketika itu Makkah dan Madinah dikuasai Wahabi. Terpesona oleh gerakan Wahabi, sekembalinya ke Nusantara (Indonesia) Haji Miskin berusaha melakukan gerakan pemurnian sebagaimana dilakukan Wahabi, yang juga didukung oleh dua haji yang lain.²⁹ Pemikiran dan gerakan mereka setali tiga uang dengan Wahabi, mereka memvonis tarekat Syattariyah, dan tasawuf secara umumnya, yang telah hadir di Minangkabau beberapa abad sebelumnya sebagai kesesatan yang tidak bisa ditoleransi, di dalamnya banyak takhayul, bid'ah, dan khurafat yang harus diluruskan, kalau perlu diperangi.³⁰ Tuanku Nan Renceh, misalnya, memusuhi Tuanku Nan Tuo, gurunya sendiri karena yang disebut terakhir lebih memilih bersikap moderat dalam mengajarkan Islam. Tuanku Nan Renceh juga mengkafirkan Fakih Saghir, sahabat dan teman seperguruannya, dan menyebutnya sebagai raja kafir dan rahib tua hanya karena tidak berbagi pandangan keagamaan dengannya.³¹

29. Abdul A'la, "Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara: Akar dan Karakter Pemikiran dan Gerakan Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan," Pidato Pengukuhan Guru Besar, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Mei 2008 (tidak dipublikasikan), h. 11.

30. Oman Fathurrahman, *Tarekat Shattariyah di Dunia Melayu-Indonesia: Kajian atas Dinamika dan Perkembangannya Melalui Naskah-naskah di Sumatera Barat*, Disertasi pada Program Studi Ilmu Susastera Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2003 (Tidak dipublikasikan), h. 164, sebagaimana dikutip Abdul A'la, *ibid.*, h. 14.

31. Suryadi, "Kontroversi Kaum Padri: Jika Bukan Karena Tuanku Nan Renceh" dalam <http://naskahkuno.blogspot.com/2007/11/kontroversi-kaum-padri-jika-bukan.html>, seperti dikutip Abdul A'la, *ibid.*, h. 14.

Beberapa kekerasan yang dilakukan Padri, selain mengikuti kegemaran Wahabi memusyrikkan, mengkafirkan, dan memurtadkan siapa pun yang berbeda, mereka juga menerapkan hukum yang sama sekali asing dalam diktum hukum Islam, seperti kewajiban memelihara jenggot dan didenda 2 suku (setara dengan 1 gulden) bagi yang mencukurnya; larangan memotong gigi dengan ancaman denda seekor kerbau bagi pelanggarnya; denda 2 suku bagi laki-laki yang lututnya terbuka; denda 3 suku bagi perempuan yang tidak menutup sekujur tubuhnya kecuali mata dan tangan; denda 5 suku bagi yang meninggalkan shalat fardlu untuk pertama kali, dan hukum mati untuk berikutnya.³²

Para Padri juga melegalkan perbudakan. Tuanku Imam Bonjol, tokoh Padri terkemuka dan dikenal sebagai pahlawan nasional, mempunyai tujuh puluh orang budak laki-laki dan perempuan. Budak-budak ini sebagian merupakan hasil rampasan perang yang mereka lancarkan kepada sesama Muslim karena dianggap kafir.³³

Kekerasan lain yang dilakukan Padri terhadap sesama Muslim di Minangkabau, antara lain penyerangan terhadap istana Pagaruyung pada tahun 1809. Serangan ini diawali oleh tuduhan Tuanku Lelo, tokoh Padri, bahwa beberapa keluarga raja seperti Tuanku Rajo Naro, Tuanku di Talang, dan seorang anak raja lainnya, tidak menjalankan akidah Islam secara benar dan dianggap kafir, sehingga harus dibunuh. Pembantaian massal pun dilakukan terhadap para anggota keluarga dan pembantu raja, termasuk para penghulu yang dekat dengan istana.³⁴ Pada tahun 1815, serangan dilakukan kembali dibawah komando Tanku Lintau. Dalam serangan kali ini, gerakan Padri membunuh hampir seluruh keluarga kerajaan yang telah memeluk Islam sejak abad ke-16 itu. Kekeja-

32. Abdul A'la, *ibid.*, h. 14-15.

33. Untuk deskripsi lebih lengkap, baca: Abdul A'la, *ibid.*, h. 15-16.

34. Lihat Puti Reno Raudha Thaib, "Sejarah Istana Pagaruyung" dalam <http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/message/61114>, sebagaimana dikutip Abdul A'la, *ibid.*, h. 22-23.

man Padri tidak hanya dalam hal itu saja. Tercatat, Tuanku Nan Renceh telah menghukum bunuh bibinya sendiri yang sudah tua, dan tidak membolehkan jenazahnya dikubur tetapi dibuang ke hutan, semata karena mengunyah sirih yang diharamkan Wahabi.³⁵ Apa yang dilakukan kaum Padri ini sama belaka dengan yang dilakukan oleh Wahabi pada masa formasinya dan oleh pengikutnya seperti al-Qaeda dan Taliban sampai dewasa ini.

Gerakan Padri berakhir, di samping karena faktor penjajahan, juga karena secara alamiah bertentangan dengan suasana, tradisi, dan budaya bangsa Indonesia. Fakta ini merupakan bukti kongkret betapa virus Wahabi yang menjangkiti jantung dunia Islam bisa menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh dunia Islam. Berakhirnya gerakan Padri tidak mengakhiri penyusupan Wahabi ke Indonesia.

Infiltrasi Gerakan Transnasional pada Masa Orde Baru hingga Dewasa ini

Sejak dekade 1970-an, ketika umat Islam Indonesia kesulitan keuangan untuk membiayai studi para mahasiswa belajar ke luar negeri, Wahabi menyediakan dana yang lumayan besar melalui DDII untuk membiayai mahasiswa belajar ke beberapa negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Belakangan, kebanyakan alumni program ini menjadi agen penyebaran paham transnasional dari Timur Tengah ke Indonesia. Tidak berhenti di situ, dengan dukungan dana Wahabi pula, DDII mendirikan LIPIA, dan kebanyakan alumninya kemudian memainkan peran yang berpengaruh sebagai agen Salafi (Wahabi) dan Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin). DDII pula yang telah meletakkan dasar gerakan dakwah di kampus-kampus, dan sebagaimana alumni Timur Tengah, mereka juga menjadi para agen penyusupan paham gerakan transnasional ke Indonesia.

Masih dengan dukungan dana Wahabi, DDII juga memainkan

35. Abdul A'la, *ibid.*, h. 23.

peran penting dalam penerjemahan buku-buku dan penyebaran gagasan tokoh-tokoh gerakan transnasional seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Abul A'la Maududi, Yusuf Qardawi, dan lain-lain. Penerbitan Sabili yang mencapai tiras 100.000 eksemplar diduga tidak lepas dari dukungan dana Wahabi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembentukan DDII tidak terlepas dari pembubaran Masyumi yang saat itu dikuasai oleh kelompok puritan, modernis. Namun pasti tidak benar melakukan generalisasi bahwa para tokoh modernis adalah agen gerakan transnasional, tetapi Wahabi-Ikhwani Muslimin dengan cerdas melihat peluang-peluang sekecil apa pun untuk menyusup ke dalam organisasi modernis untuk kemudian memanfaatkannya demi penyebaran ideologinya.

Selain DDII, menjelang dan setelah Orde Baru tumbang, Indonesia menyaksikan begitu banyak kelompok-kelompok garis keras lokal yang tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Beberapa di antara kelompok ini antara lain Fron Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Jihad, Jamaah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), PKS, Komite Persiapan Penerapan Syari'ah Islam (KPPSI) di beberapa daerah, dan lain-lain. Dalam momen inilah, Ikhwani Muslimin (yaitu PKS)³⁶ dan Hizbut Tahrir me-

36. Haedar Nashir menulis:

Keterkaitan PKS dengan Ikhwani Muslimin sendiri juga diakui oleh Anis Matta, seorang tokoh dan sekjen Partai Keadilan Sejahtera. Berikut pernyataan Anis Matta:

"Inspirasi-inspirasi Al-Ikhwani Al-Muslimin dalam diri Partai Keadilan Sejahtera, kalau boleh digaribawahi di sini, sesungguhnya memberikan kekuatan pada dua dimensi sekaligus. Pertama, inspirasi ideologis yang –salah satunya– didasarkan kepada prinsip Syumuliyat Al-Islâm, sesuatu yang bukan hanya menjadi prinsip perjuangan Hasan Al-Banna saja, tapi juga pejuang-pejuang yang lain. Kedua, inspirasi historis, semacam mencari model dan maket dari sebetuk perjuangan Islam di era setelah keruntuhan Al-Khilafah Al-Islamiyyah dan dominasi imperialisme Barat atas negeri-negeri Muslim. Tetapi yang mempertemukan dua inspirasi itu pada diri Hasan Al-Banna

nampakkan diri secara terbuka di Indonesia. Hingga saat ini, gerakan kelompok-kelompok garis keras sudah menyebar seperti kanker ke seluruh tubuh bangsa, mereka menyusup dari istana negara hingga ke pegunungan. Hasil penelitian lapangan dan konsultasi seperti dipaparkan buku ini menunjukkan dengan jelas bahwa gerakan mereka sangat sistematis, terencana, dan dengan dukungan dana yang luar biasa.

Pola-pola penyusupan yang mereka lakukan sangat beragam, seperti pendekatan finansial hingga hal-hal yang tak terpikirkan seperti melalui layanan kebersihan (*cleaning service*) gratis di masjid-masjid, bahkan dengan pola akademis atau berbagi pengetahuan. Dalam kaitan ini, pada akhir tahun 2005, proposal dari sebuah LSM telah ditunjukkan kepada Kepala Negara berisi tawaran kerjasama dalam penyaluran dana sebesar 500 juta dollar AS yang diparkir di beberapa bank asing di Luar Negeri. Jika pemerintah RI mengizinkan dana tersebut masuk dan mau bekerjasama, LSM tersebut memberi tawaran: 40% dari dana itu, yaitu USD 200 juta, untuk dimanfaatkan Kabinet RI, dan LSM dimaksud akan menggunakan 60% untuk melakukan berbagai program pembangunan non-APBN/APBD, khususnya untuk “infrastruktur pendidikan kemuliaan akhlak,” terutama di Sulawesi Tengah yang baru saja keluar dari konflik bersenjata yang di dalamnya kelompok-kelompok garis keras terlibat dengan jelas. Tidak cukup sampai di situ, proposal itu menyebutkan bahwa jika pemerintah RI tertarik dengan

dan Al-Ikhwaniul Muslimun, adalah pada aspek denyut pergerakannya. Sebab, pada saat tokoh-tokoh yang lain menjadi pembaharu dalam lingkup pemikiran, Hasan Al-Banna berhasil mengubah pembaharuan itu dari wacana menjadi gerakan. Dan tidak berlebihan, bila inspirasi gerak itu juga yang secara teras dapat disalami dalam denyut Partai Keadilan Sejahtera.”

Anis Matta, “Kata Pengantar” dalam Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (Bandung: Teraju, 2004), sebagaimana dikutip Haedar Nashir, *ibid.*, h. 33-34.

dana itu, maka “Dari pihak LSM mengharapkan diberikan kesempatan (lisensi) untuk menempatkan personilnya di dalam Lembaga Perencanaan Negara dan Pengawasan Negara (Tim Ekonomi RI).”

Sumber *confidential* di lingkungan istana yang mengetahui proposal tersebut menyatakan kepada peneliti kami bahwa dana itu berasal dari Arab Saudi dan, melalui beberapa bank di Malaysia, dicoba dimasukkan ke Indonesia melalui jalur resmi (izin pemerintah) mengingat jumlahnya yang teramat fantastis. Sumber kami menambahkan, proposal tersebut tiba-tiba lenyap dari istana karena ada pribadi-pribadi yang sangat prihatin pada dampak buruk proposal tersebut jika betul-betul disetujui.³⁷ Namun yang jelas kasus ini menunjukkan adanya upaya intervensi kekuasaan Timur Tengah terhadap Indonesia dengan dukungan dana yang sangat besar.

Usaha-usaha penyusupan secara finansial banyak dilakukan kepada orang-orang terkemuka yang diduga bisa dibeli. Ada beberapa yang memang dengan senang hati menikmati dana Wahabi dan rela menjadi saluran penyebaran ideologinya. Namun ada juga tokoh-tokoh yang lebih mencintai bangsa dan negaranya, lebih meyakini kebenaran ajaran Islam yang toleran dan moderat daripada ideologi yang keras dan ekstrem, dan dengan tegas menolak godaan dana Wahabi. Kasus yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, adalah contoh menarik. Rektor UIN Sunan Kalijaga, pernah didatangi 2 orang Arab Saudi yang membawa beberapa keping cd berisi buku-buku Wahabi dan Ikhwanul Muslimin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kepada Rektor, kedua orang itu menawarkan uang untuk menggunakan nama UIN Sunan Kalijaga sebagai penerbit. Tawaran itu ditolak oleh Rektor karena ia tahu bahwa buku itu mengandung ajaran dan paham ekstrem yang akan disebarkan untuk mewahabikan Islam Indonesia melalui UIN Sunan Kalijaga. Sayang, tidak semua orang Indonesia berakhlak mulia seperti Rektor tersebut, sehingga

37. Wawancara peneliti konsultasi dengan sumber *confidential* pada 2006.

mereka rela menjual agama, rela menjadi agen Wahabi, dan rela mengorbankan masa depan bangsa dan negara kita. Dari sini jelas lagi bahwa Wahabi tidak hanya membiayai terorisme, tetapi juga penyebaran ideologi.

Penyerobotan masjid ini merupakan salah satu saja dari sekian cara penyusupan kelompok garis keras. Penyusupan dengan pola-pola akademis lazim dilakukan kepada dewan penyantun, pimpinan kampus, pengurus senat mahasiswa, dan lain-lain. Bahkan juga mendirikan jaringan sekolah-sekolah sendiri, seperti sekolah-sekolah “Islam Terpadu.” Dari situ jelas bahwa kelompok-kelompok dakwah kampus bergerak secara sistematis untuk menguasai dunia pendidikan dan masa depan Indonesia dengan pandangan Wahabi-Ikhwatul Muslimin maupun Hizbut Tahrir.

Usaha merebut lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah lebih mudah dibanding usaha merebut lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan NU, bahkan lebih mudha lagi merebut lembaga-lembaga pendidikan umum yang tidak berafiliasi baik dengan NU maupun Muhammadiyah. Institusi di lingkungan Muhammadiyah lebih diikat dengan relasi formal-struktural, sedangkan di lingkungan NU lebih bersifat emosional-kultural. Di samping itu, banyak anggota Muhammadiyah tampak lebih reseptif pada gagasan-gagasan kelompok garis keras karena orientasi purifikasi Muhammadiyah yang tidak politis mirip dengan gerakan garis keras yang menjadikan gerakan purifikasi sebagai salah satu proyeknya. Banyak mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan umum yang tidak berafiliasi dengan keduanya, hampir sama sekali tidak punya alasan atau kemampuan teologis untuk menolak ideologi garis keras karena tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam.

Bahaya di Pelupuk Mata

Wahabi, di samping dua rekannya yang sama-sama keras dan ekstrem, punya andil besar dalam berbagai kekerasan yang selama

ini terjadi di seluruh dunia, baik kekerasan doktrinal, kultural, maupun sosial. Namun demikian, kebanyakan umat Islam Indonesia kerap tidak menyadari bahaya laten yang dibawa kelompok-kelompok garis keras ini semata karena kesadaran normatif yang begitu kuat. Umat Islam Indonesia selama ini cenderung melihat Islam sebagai identik dengan Arab, dan sebaliknya. Karena itu, setiap yang datang dari Arab nyaris tidak pernah dicurigai dan mudah diterima. Hal ini disebabkan kesadaran normatif Muslim Indonesia yang melihat Arab sebagai tempat diturunkannya Islam. Karena alasan inilah umat Islam Indonesia tampak enggan mengkritisi Wahabi yang merupakan paham resmi penguasa Kerajaan Arab Saudi. Sejatinya, sikap hormat tidak perlu menafikan rasionalitas dan sikap kritis.

Secara ringkas bisa dikemukakan bahwa agenda utama kelompok-kelompok garis keras adalah untuk meraih kekuasaan politik melalui formalisasi agama. Mereka mengklaim, jika Islam menjadi dasar negara, jika syari'ah ditetapkan sebagai hukum positif, jika Khilâfah Islamiyah ditegakkan, maka semua masalah akan selesai. Semua ini adalah utopia. Jika saja mereka memahami respon 'Ali ibn Abi Thalib kepada Khawârij menjelang *Tahkîm*,³⁸ akan sangat jelas bahwa sebaik apa pun ajaran dan pesan agama sebagaimana termaktub dalam kitab suci, semua tergantung pada pembaca dan penganutnya, tentu mereka tidak akan memanfaatkan agama untuk meraih kekuasaan politik. Namun, sudah jamak disuarakan, gerakan-gerakan garis keras (terutama Wahabi) sebenarnya adalah reinkarnasi Khawârij. Karena itu, mustahil neo-Khawârij bersibuk

38. Dalam peristiwa tersebut *Khawârij* menemui 'Ali dan mengutip ayat bahwa "(hak menetapkan) hukum hanya milik Allah (*in al-hukm illâ liLlâh*), dengan maksud agar *ishlâh* yang ditawarkan Mu'âwiyah ditolak dan perang diteruskan hingga yang terakhir ini menyerah. 'Ali, yang lebih memilih jalan *ishlâh*, menjawab, "Kitab suci tidak membawa maknanya di atas pundaknya. Ia membutuhkan pembaca untuk menyampaikan maknanya. Dan pembaca itu adalah manusia." Manusia, potensial mencapai kebenaran, sebagaimana juga potensial jatuh pada kesalahan.

memahami respon ‘Ali tetapi gigih mengkafirkan umat Islam lain yang berbeda dari atau bahkan bertentangan dengan mereka dan memperjuangkan formalisasi agama untuk mencapai tujuan politiknya.

Memang, tentu ada relasi antara berbagai permasalahan sosial dengan pengabaian terhadap ajaran agama. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Tapi solusinya bukanlah pada formalisasi agama, melainkan pada perbaikan akhlak idividu-individu sebagai para penganut agama. Solusi formalisasi agama lebih sebagai dalih untuk mencapai suatu tujuan politik daripada untuk memperbaiki permasalahan sosial. Karena permasalahan sebenarnya bukanlah pada agama yang tidak diformalkan tetapi pada para penganut agama yang mengabaikan pesan-pesan luhur agamanya.

Formalisasi agama jelas sangat membahayakan, baik bagi agama itu sendiri maupun penganutnya/bangsa Indonesia. Dengan formalisasi, agama akan diamputasi sedemikian rupa, dilepaskan dari konteks sosial dan kultural masa risalah, disapih dari pertumbuhannya sepanjang sejarah, dan pesan-pesannya akan ditentukan berdasarkan bingkai ideologis dan/atau platform partai politik. Dalam situasi demikian, identitas dan simbol-simbol keagamaan menjadi bagian terpenting, bahkan lebih penting dari substansi pesan agama itu sendiri, untuk diperjuangkan. Mereka mengejar simbol-simbol, bukan mengamalkan substansi ajaran agama.

Beberapa contoh gairah memperjuangkan simbol ini bisa dikemukakan, baik yang bersifat personal maupun publik. Sebuah riwayat menuturkan bahwa Tuhan akan mencintai hamba-hambaNya yang mempunyai tanda hitam di dahinya. Berdasarkan riwayat ini, sangat banyak aktivis kelompok garis keras yang berusaha membuat dahinya hitam, padahal yang dimaksudkan adalah banyak bersujud, beribadah, berserah diri kepada Allah swt., berusaha mencinta-Nya dengan sepenuh hati sehingga dia juga akan mencintai seluruh makhluk-Nya. Mereka berpikir bahwa tanda hitam

itu akan ditunjukkan sebagai bukti kepada Tuhan kelak di akhirat, padahal Allah swt. melihat hati dan perbuatan, bukan simbol-simbol. Demikian pula dengan jenggot dan pakaian. Dugaan terbaik, hal ini disebabkan tidak adanya kemampuan membedakan antara substansi ajaran agama dari simbol-simbol keagamaan atau budaya. Hal ini wajar, karena pemahaman mereka bersifat harfiah belaka. Namun kemungkinan lainnya, semua ini digunakan sebagai identitas politik untuk membedakan dari kelompok lain yang moderat dan toleran, yang memahami pesan agama lebih pada tataran substansi daripada tataran dan tanda artifisial.

Pembacaan secara harfiah dan mengutamakan simbol-simbol ini akan mengarahkan umat menjadi monolitik, penyeragaman. Tidak heran jika kelompok-kelompok garis keras kemudian menolak pluralisme, baik pluralisme agama-agama maupun dalam agama. Hal ini sangat berbahaya karena tidak akan pernah ada celah untuk perbedaan, setiap yang berbeda, dengan menggunakan term-term teologis, akan divonis kafir, murtad dan semacamnya. Pengkafiran, kebiasaan buruk Khawârij dan para pengikutnya (neo-Khawarij) ini, belakangan sangat subur di Indonesia. Gejala ini seharusnya menyadarkan kita bahwa bahaya sebenarnya bukan jauh di luar negeri, tetapi sudah di dalam selimut.

Dalam hubungannya dengan agama-agama lain, dengan indah Nabi menuturkan, “*Nahnu abnâ’u ‘allât, abûnâ wâhid wa ummunâ syattâ*” (Kami [para rasul] adalah anak-anak para istri dari seorang laki-laki, ayah kami satu namun ibu kami banyak). Dalam keluarga umat manusia, para rasul mempunyai ayah (agama) yang sama, yakni Islam (dalam arti berserah diri kepada Tuhan), namun mempunyai ibu (*syir’ah wa minhâj*) yang banyak/berbeda-beda.³⁹ Ini

39. “...Islam datang menguatkan agama-agama, dan membenarkan sebagian premisnya. Namun tidak mengatakan bahwa ia adalah sesuatu yang berbeda dari agama-agama sebelumnya, bahkan sebaliknya. Nabi selalu mengatakan, ‘Aku bukanlah sebagian dari para rasul. Kami bersama, para rasul adalah anak-anak *‘allât*.’ *Allât* adalah para perempuan yang kawin dengan seorang laki-laki. Ayah

adalah pengakuan atas pluralisme, dan inilah yang ditolak oleh kelompok garis keras.

Formalisasi hukum Islam sebagai hukum positif melalui Perda-perda Syari'ah di beberapa daerah merupakan strategi "desa mengepung kota" garis keras. "Jika daerah-daerah telah menerapkan syari'ah Islam sebagai hukum positif, maka tidak —akan— ada alasan untuk menolaknya secara nasional," jelas tokoh-tokoh kelompok garis keras kepada peneliti kami terkait usaha formalisasi hukum Islam yang mereka lakukan. Sialnya, perda-perda dimaksud lebih merupakan aplikasi harfiah dan parsial atas hukum Islam, maka bisa dipastikan akan menimbulkan distorsi dan reduksi terhadap Islam itu sendiri, di samping diskriminasi dan alienasi terhadap non-Muslim maupun Muslim sendiri.

Seperti diketahui, kelompok-kelompok garis keras memahami teks-teks keagamaan secara harfiah, dan mengabaikan ayat-ayat dan hadits-hadits yang tidak mendukung kepentingan mereka. Maka pesan agama pun direduksi sebatas makna atau pesan yang bisa disampaikan dalam rangkaian huruf-huruf saja sesuai dengan ideologi mereka. Ayat-ayat atau hadits-hadits tentang perempuan, pencuri, atau pembunuh misalnya, diturunkan ke dalam diktum hukum yang sangat harfiah dan dengan sanksi bermotif dendam. Pertanyaan mendasarnya, apakah ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut dikemukakan memang untuk mencambuki perempuan, membuntungi tangan dan kaki pencuri, dan membunuh para pembunuh? Jika jawabannya positif, di mana letak pesan utama Islam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk dan misi Kanjeng Nabi Muhammad saw. untuk menyempurnakan akhlak mu-

mereka, anak-anak *'allât*, ayah kami adalah agama yang satu, tauhid. Ibu kami banyak. Ibu-ibu artinya adalah syari'ah-syari'ah, syari'ah banyak. Dalam Islam dikatakan ada perbedaan syari'ah-syari'ah tapi bukan perbedaan agama. Syari'ah berbeda-beda, tapi agama tidak berbeda." (Penjelasan Mariam Syarif al-Khalifa dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 4: "Kaum Beriman," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation).

lia? Ketika rahmat dan akhlak mulia tidak lagi ditemukan dalam aplikasi pesan-pesan agama, maka pasti agama sudah dibaca secara keliru dan pemahaman seperti itu tidak bisa diterima.

Pembacaan secara harfiah dan parsial memang sangat menguntungkan untuk membingkai pesan-pesan agama dengan ideologi dan/atau platform partai politik. Karena dengan dalih makna (harfiah), seseorang atau kelompok tertentu bisa menyembunyikan agenda politiknya pada saat membajak ajaran agama. Siapa pun yang tidak akrab dengan kompleksitas *ta'wil* teks-teks keagamaan sebagaimana populer di kalangan ulama *Ahlussunnah walJamâ'ah*, bisa kesulitan menghadapi klaim-klaim teologis kelompok-kelompok garis keras yang didasarkan pada makna-makna harfiah. Bahkan, mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun bisa ditipu untuk mendukung agenda politiknya, seperti dibuktikan dalam studi ini bahwa banyak mahasiswa dan para profesional yang simpati dan bahkan menjadi pengikut PKS atau HTI.

Formalisasi agama memang anak kandung pembacaan harfiah atas teks-teks agama dan sangat berbahaya, baik bagi agama itu sendiri, para penganutnya, maupun penganut agama yang berbeda. Pesan-pesan luhur agama direduksi pada tingkat kepentingan ideologis, pemaknaan yang monolitik akan mengarah pada penyeragaman para penganut agama, dan penganut agama yang berbeda akan terpinggirkan, teralienasi dari komunitas umat beragama yang ekstrem. Di sini pluralisme terasa ganjil bagi pejuang formalisasi agama, karena formalisasi dan pemaknaan harfiah ini pula, kelompok-kelompok garis keras sulit menerima kehadiran non-Muslim dan Muslim dengan paham yang berbeda.

Memang, dalam salah satu riwayat diceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad saw. berkata, "Aku diperintahkan memerangi siapa pun hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah" (*Umirtu an uqâtil al-nâs hattâ yasyhadû lâ Ilâh ill Allâh*). Di tangan kelompok garis keras, ini jelas keteladanan untuk menghabisi non-Muslim, dan perang melawan non-Muslim menemukan landasan

legal-teologisnya. Namun ini bukanlah satu-satunya pembacaan. Hadits ini bisa bermakna lain dalam hati siapa pun yang akrab dengan kompleksitas *ta'wil* dan peduli pada keseluruhan pesan Islam dan misi Nabi saw.

Jika Islam merupakan rahmat bagi seluruh makhluk (bukan hanya Muslim), maka tidak mungkin Nabi menyatakan dirinya diperintahkan membantai non-Muslim. Jika misi Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia, maka pembunuhan, dari sudut pandang mana pun dan terhadap siapa pun, sangatlah tidak bermoral. Maka hadits ini harus dibaca dalam konteks keseluruhan pesan Islam dan misi Nabi saw. Pembacaan secara parsial hanya akan menyebabkan agama menjadi sumber kebingungan.

Berdasarkan mata rantai transmisinya, hadits ini bisa diterima memang dikemukakan oleh Nabi saw. Namun harus ditekankan, kalimat tauhid sebagai kata kunci dalam hadits tersebut bukanlah dalam makna formal, di dalamnya tidak disertakan penyaksian bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Maka, pertama, kalimat tauhid tersebut menekankan makna hanya menuhankan Allah semata, apa pun agamanya. Dalam ungkapan lain bisa dikemukakan, “hingga mereka berserah diri, tunduk, dan patuh kepada Allah swt.,” dan tidak menuhankan apa pun selain-Nya, seperti kekuasaan, kekayaan, politik, dan berbagai bentuk arogansi lainnya. Sangat masuk akal kalau mereka harus diperangi, karena siapa pun yang menuhankan kekuasaan, kekayaan, politik, dan semacamnya, sebenarnya menuhankan hawa nafsunya, dan akan melakukan apa pun demi memuaskan pujaannya. Namun tentu saja perang harus dilakukan dalam kerangka akhlak mulia, seperti penyadaran, membela diri, dan semacamnya.

Kedua, perintah memerangi ini bukan dalam konteks memaksa siapa pun masuk Islam. Karena jika dimaknai demikian, akan bertentangan dengan penegasan al-Qur'an sendiri bahwa “tidak ada paksaan dalam agama” (*lā ikrāh fi al-dīn* [QS. 2: 256]), maka siapa pun boleh beriman dan siapa pun boleh kafir (*fa man syā'a*

fa-lyu'min wa man syâ'a fa-lyakfur [QS. 18: 29]). Maka perintah memeringi siapa pun yang tidak bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah bukanlah dalam konteks teologis, tetapi sosiologis. Namun di tangan kelompok-kelompok garis keras, makna harfiah inilah yang dipegang teguh dan mereka lupa bahwa “tidak ada paksaan dalam agama,” bahwa “Islam adalah rahmat bagi seluruh makhluk” (bukan Muslim saja), dan bahwa “Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.”

Jelas bahwa literalisme tertutup dan formalisasi agama amat berbahaya, baik pada tataran epistemologis maupun praksis. Maka sangat penting untuk menyadari bahaya laten kelompok-kelompok garis keras yang biasa dengan literalisme tertutup dan mengagendakan formalisasi agama. Formalisasi agama yang diperjuangkan kelompok-kelompok garis keras lebih didorong oleh motivasi politik daripada agama. Dari sudut pandang manapun, sulit menerima politisasi agama sebagai bagian dari ajaran agama, karena formalisasi agama sendiri adalah pengebirian terhadap agama itu sendiri. Bagi mereka, agama sudah menjadi tujuan. Maka agama pun, secara meyakinkan, akan kehilangan pesan-pesan luhurnya, yang tersisa hanyalah simbol-simbol keagungan agama itu sendiri. Ini merupakan salah satu kesalahkaprahan dalam melihat dan memahami agama. Seharusnya, agama dilihat dan diikuti sebagai petunjuk, sebagai jalan, menuju Ilahi agar penganut agama menjadi manifestasi substansi pesan utama dan luhur agama. Ketika agama menjadi tujuan, maka Tuhan pun sirna dalam semesta keagamaan itu sendiri. Dalam konteks inilah, formalisasi agama terlihat jelas tidak didorong oleh motivasi agama, melainkan politik.

Bahaya formalisasi agama menjadi semakin kuat, dalam kasus Indonesia, karena didukung dengan sumber dana yang kuat serta sistem penyusupan yang terencana. Sudah jamak diketahui bahwa dana Wahabi leluasa mengalir ke Indonesia, dari pihak penguasa seperti tidak peduli, seakan dana itu tidak membawa agenda terselubung yang merupakan benih bahaya laten bagi Indonesia.

Di samping sebagai imbalan dalam relasi simbiosis mutualistik antara gerakan-gerakan transnasional dengan kaki tangannya di Indonesia, dana tersebut juga digunakan untuk menyebarkan gagasan formalisasi agama dan membangun sistem penyusupan ke semua bidang kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari istana hingga ke kampung-kampung, dalam instansi-instansi pemerintahan dan masyarakat sipil, bahkan dengan cara-cara yang selama ini hampir tak terpikirkan kecuali oleh para penyusup itu sendiri.

Seperti telah dikemukakan, penting disadari bahwa banyak gerakan kelompok garis keras memang sejak awal sudah melakukan rekrutmen dengan sistem sel, dan siapa pun yang berhasil direkrut akan dibina dalam beberapa tahap ‘pembinaan’, seperti *ta’rif* (pengenalan dan penanaman ajaran), *takwîn* (pembentukan pribadi sesuai ajaran), dan *tanfidz* (eksekusi ajaran).⁴⁰ Peneliti kami mendapat informasi dari seorang anggota keluarga pendukung PKS di Jakarta bahwa, ketika terjadi perselisihan pribadi di antara dua bibinya, salah seorang darinya mengancam akan melaporkan perselisihan pribadi tersebut ke pengurus partai. Kasus ini mengingatkan pada kontrol pemerintahan komunis-Stalin di Uni Soviet yang sentralistik dan berusaha mengontrol semua aspek kehidupan rakyat.

Dengan perekrutan sistem sel seperti ini, dan dengan dukungan dana yang kuat, penyusupan yang mereka lakukan sangat terencana dan berbahaya. Mereka menyusup ke tempat-tempat peribadatan seperti masjid-masjid, ke dunia pendidikan seperti kampus-kampus dan bahkan ke beberapa pesantren yang biasanya diawali dengan pemberian buku-buku yang mengandung virus gagasan garis keras, ke media massa dan penerbitan, ke dunia bisnis, bahkan ke partai politik dan pemerintahan. Di samping menyusup ke masjid-masjid dan dunia pendidikan, garis keras juga membangun masjid-masjid baru atau merenovasinya dengan dukungan dana Wahabi seperti –antara lain– di Kabupaten Magelang, dan

40. Untuk deskripsi lengkap mengenai tahapan-tahapan pembentukan sistem penyusupan ini, penting untuk membaca: Haedar Nashir, *ibid.*, h. 7-35.

mendirikan sekolah-sekolah “terpadu” sendiri di berbagai daerah. Ini merupakan bentuk lain perkawainan Wahabi-Ikhwatul Muslimin yang berlangsung di Indonesia.

Memang, bantuan masjid dipandang berguna dan terhormat. Tapi ketika itu disertai dengan syarat agar mendukung partai politik tertentu, agar menerima ajaran tertentu, itu merupakan penyusutan ajaran sekte dan agenda politik. Mereka membangun mesjid bukan untuk menyediakan tempat ibadah, tapi untuk membangun sarana penyebaran ajaran dan kampanye partai. Ini merupakan aksi memanipulasi rakyat yang polos dengan ideologi dan dana asing (Arab Saudi) yang luar biasa besar untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia, sementara pada saat yang sama mereka menierakkan adanya ancaman asing (Barat) terhadap Indonesia. Karena alasan inilah Muhammadiyah mengeluarkan SKPP Muhammadiyah Nomor 149/Kep/I.0/B/2006 yang melarang dan mengamanahkan para pengurus agar mengusir PKS keluar dari Muhammadiyah,

“...Muhammadiyah pun berhak untuk dihormati oleh siapa pun serta memiliki hak serta keabsahan untuk bebas dari segala campur tangan, pengaruh, dan kepentingan pihak manapun yang dapat mengganggu keutuhan serta kelangsungan gerakannya” (Konsideran poin 4). “Segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik. Karena itu, dalam menghadapi partai politik manapun kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dari, serta tidak menghimpitkan diri dengan misi,

kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai politik tersebut.” (Keputusan poin 3)

Gaya-gaya seperti ini, yakni menyediakan dan memperbaiki sarana peribadatan (masjid) tetapi untuk tujuan politik, mengingatkan pada kasus ketika KNIL berusaha masuk ke Indonesia dengan membonceng pada Pasukan Sekutu. Usaha demikian selalu dilakukan karena sudah sejak awal merasa bahwa kedatangannya akan ditentang dan ditolak, sejak awal tidak ada rasa percaya diri karena memang berlawanan, bahkan bertentangan, dengan tradisi keberagamaan bangsa Indonesia.

Ada kontradiksi yang jelas antara tradisi dan budaya keberagamaan bangsa Indonesia dengan kelompok-kelompok garis keras yang secara kultural berkiblat ke Timur Tengah. Tradisi keberagamaan bangsa Indonesia kental dengan nilai-nilai spiritualitas yang diwarisi dari generasi ke generasi, tradisi yang sebenarnya dimusuhi oleh kelompok-kelompok garis keras. Tradisi ini mengajarkan dan menekankan pola hidup berdampingan secara damai, baik dengan sesama manusia maupun alam, baik dengan yang berkeyakinan sama maupun beda, yang menerima perbedaan sebagai realitas dan kekayaan yang harus dihargai. Pola keberagamaan demikian tidak akan pernah lekang oleh panas dan tak akan pernah lapuk oleh hujan, akan selalu sesuai dengan perkembangan sejarah dan perkembangan hidup para penganutnya.

Memang, spiritualitas lebih menekankan rasa (*dzauq*) dalam beragama, sedangkan rasionalitas (*'aql*) menjadi pendorong di dalamnya. Ini adalah pola keberagamaan para nabi seperti dialami oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Musa as. ketika mencari dan berusaha mengenal Allah swt. Nabi Muhammad saw. pun, ketika menjelaskan relasi 'ubûduyah manusia dengan Tuhan menyatakan, “Mengabdilah kepada-Nya *seakan-akan* kamu melihat-Nya. Namun jika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.” Ungkapan *seakan-akan* menegaskan bahwa potensi inderawi (*hiss*)

dan rasional (*'aql*) memang berguna dalam beragama, namun ia harus dilampauhi, kemudian rasa (*dzauq*) yang akan berperan penting dalam merasakan kehadiran Ilahi. Keluasan dan keluhuran ajaran dan pesan agama tidak bisa dibingkai semata oleh akal dan aktivitas jasmaniah, apalagi ideologi dan platform partai politik. Ia hanya bisa ditampung oleh keluasan rasa, kelapangan hati. Dalam konteks inilah, firman Allah swt. dalam hadits kudsi yang menyatakan, “Bumi dan langit-Ku tidak mampu menampung-Ku, tetapi hati hamba-Ku yang beriman,” harus direnungkan secara mendalam. Maka penolakan atas spiritualitas jelas merupakan sebuah arogansi beragama. Dan inilah, terutama, yang ditolak oleh kelompok-kelompok garis keras.

Kelompok-kelompok garis keras sangat berbeda, bahkan hingga tingkat tertentu bertentangan, dengan tradisi dan keberagamaan spiritualistik ini. Mereka telah mereduksi agama menjadi sebatas kerangka tanpa daging, bahkan tanpa jiwa dan perasaan. Hal ini disebabkan pemahaman mereka yang harfiah dan tertutup, yang menyapiah agama dari konteks historis, sosial, dan budaya pada masa risalah dan sesudahnya hingga saat ini. Pendekatan ini telah membuat mereka terpaku pada huruf-huruf dan tidak menyadari adanya makna-makna yang lebih luas daripada sekedar yang terkandung dalam huruf-huruf tersebut. Keluhuran dan keluasan agama direduksi sebatas makna-makna harfiah yang tertutup. Tiadanya kesadaran ini pula yang telah membuat mereka membuat klaim-klaim kebenaran sepihak dan pada saat yang sama memvonis salah dan sesat setiap yang berbeda, karena mereka tidak mampu memahami realitas batin pihak lain. Padahal keberagamaan seseorang tidak diukur oleh aktivitas jasmaniah maupun intelektual, melainkan oleh kedalaman hati tanpa menafikan keduanya.

Sikap monolitik dalam beragama tidak pernah memberi ruang pada perbedaan. Dengan klaim-klaim teologis pula, mereka ingin menegaskan bahwa hanya merekalah yang benar, dan karena itu akan termasuk dalam kelompok yang selamat (*mâ ana 'alaih wa*

ash-hâbi). Tuduhan-tuduhan kafir dan musyrik kepada orang lain jelas merupakan pembunuhan karakter, rekrutmen psikologis, dan sangat politis. Sulit mencari landasan teologis untuk membenarkan tuduhan-tuduhan demikian. Karena, andai mereka memang memiliki pengamalan keagamaan yang tulus, keyakinan keagamaan yang luas dan mendalam, tentu hati mereka akan lapang melebihi keluasan langit dan bumi, sehingga tidak akan pernah sesak oleh keragaman maupun perbedaan, bahkan dengan pertentangan sekalipun. Keberagamaan yang tulus tidak akan menyediakan ruang untuk kebencian, akan selalu berpikir positif (*husn al-zhann*) terhadap siapa pun dan lebih mawaspadai realitas dirinya. Sehingga, ketika Kanjeng Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, Muslim yang sejati tidak akan sibuk mencari siapa yang tidak atau belum termasuk ke dalam *mâ ana 'alaih wa ash-hâbi* sehingga pantas dikafirkan, tetapi akan berpikir apakah dirinya sudah memenuhi kategori tersebut.

Keberagamaan yang monolitik jelas menjadi ancaman tidak hanya terhadap keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia, tetapi juga terhadap budaya dan tradisi keberagamaan bangsa Indonesia. Pemaksaan selalu menelan korbannya sendiri, cukuplah tragedi Padri sekali saja, dan jangan sampai bahaya laten komunisme terulang lagi. Kelompok-kelompok garis keras tidak hanya mengklaim sebagai yang paling benar di antara sesama Muslim yang lain, mereka berjuang untuk mengubah tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Disadari atau tidak, ini merupakan proyek formalisasi agama yang akan berujung —salah satunya— pada realisasi wahabisasi global, penegakan Khilafah Islamiyah, atau Islamisasi negara Indonesia dan melenyapkan NKRI. Karena itu, melawan formalisasi Islam bagai sekali mengayuh dayung dua—tiga pulau terlampaui: dengan menolak formalisasi Islam, kita akan menyelamatkan Islam dari reduksi dan pembajakan demi kepentingan politik, menyelamatkan Pancasila, NKRI, budaya dan tradisi keberagamaan spiritual bangsa Indonesia, dan mengilhami umat Islam

di negara-negara lain menolak ajaran palsu gerakan garis keras dan kembali kepada pesan-pesan luhur agama Islam yang benar-benar merupakan *rahmatan lil'âlamîn*.